



Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2025 Triwulan I



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, dokumen evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi tahun 2025 Triwulan I telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan dokumen ini merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi untuk kemudian dilaporkan kepada kepala daerah (Wali Kota) dan Bappeda Provinsi Jawa Barat. Evaluasi RKPD merupakan rekapitulasi hasil pencapaian kinerja dan anggaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi untuk dijadikan pedoman penyusunan perencanaan berikutnya.

Masukan dan saran membangun dalam rangka perbaikan dokumen ini sangat kami harapkan agar dokumen ini menjadi lebih sempurna dan bermanfaat. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini baik secara langsung maupun tidak langsung, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Sukabumi, Januari 2025

Kepala Bappeda Kota Sukabumi

ASEP SUHENDRAWAN, S.Sos.,M.A.P.

NIP. 19660927 198803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penyajian Laporan	11
BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA.....	13
2.1 Tujuan dan Sasaran Kabupaten/Kota	13
2.1.1 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025	15
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	17
2.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025	23
2.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025	34
2.3 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahunan 2025	92
BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024 TRIWULAN IV	93
3.1 Capaian Indikator Makro.....	93
3.2 Capaian Kinerja Sasaran	94
3.2.1 Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang Inklusif.....	94

3.2.2 Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	101
3.2.3 Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan.....	104
3.2.4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif.	107
3.3 Capaian Kinerja Tematik (Stunting, Kemiskinan, SPM, dst)	108
3.3.1 Kemiskinan	108
3.3.2 Stunting.....	110
3.3.3 Capaian SPM Kota Sukabumi Triwulan IV Tahun 2024	112
3.4 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (dilengkapi dengan table Evaluasi RKPD)	114
3.4.1 Capaian Kinerja Per Urusan	114
3.4.2 Capaian Kinerja Per Program	117
3.4.3 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	133
3.5 Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Propinsi dan Nasional	133
BAB IV PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA	151
4.1 Pendorong	151
4.2 Penghambatan	152
4.3 Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan RKPD Berikutnya.....	152
BAB V PENUTUP	154
5.1 Kesimpulan	154
5.2 Rekomendasi.....	155

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	20
Tabel 2.2	Sandingan Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD, Isu Strategis Aktual serta Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026	25
Tabel 2.3	Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026	27
Tabel 2.4	Penentuan Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi	37
Tabel 2.5	Program Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2024-2026	46
Tabel 2.6	Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	50
Tabel 2.7	Keterkaitan Prioritas Pembangunan, Program Priotas dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	53
Tabel 2.8	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Instansi/Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan 1 “Peningkatan Kondusifitas Kota”	57
Tabel 2.9	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Instansi/Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan 2 “Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa”	66
Tabel 2.10	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Instansi/Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan 3 “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif”	69

Tabel 2.11	Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi Tahun 2025	76
Tabel 2.12	Persandingan Keselarasan Sasaran Prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi Tahun 2024	79
Tabel 2.13	Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Kota Sukabumi, Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	81
Tabel 3.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023 (miliar rupiah).....	98
Tabel 3.2	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023 (persen)	99
Tabel 3.3	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (persen).....	100
Tabel 3.4	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2021-2023 (miliar)	101
Tabel 3.5	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2021-2023 (persen).....	101
Tabel 3.6	Luas Dataran Kecamatan se-Kota Sukabumi	105
Tabel 3.7	Data Capaian Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan.....	106
Tabel 3.8	Data Capaian Indikator Tata Keleloa Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif.....	107
Tabel 3.9	Capaian Indikator Tujuan/Sasaran (IKU RPD) Triwulan IV Tahun 2024	107
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Triwulan IV	114
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Per Program	117

Tabel 3.12 Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024 135

Tabel 3.13 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024 146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pendekatan perencanaan berbasis T-H-I-S.....	14
Gambar 2.2	Tema Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD dan Penjabarannya ke dalam RKPD	34
Gambar 2.3	Tema atau Fokus Pembangunan Tahunan Periode 2024-2026	35
Gambar 3.1	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	95
Gambar 3.2	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 (persen)	96
Gambar 3.3	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2023 (persen)	96
Gambar 3.4	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (5 terbesar).....	97
Gambar 3.5	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran.....	97
Gambar 3.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi menurut Dimensi Penyusunnya, 2020-2023	104
Gambar 3.8	Luas Daerah Menurut Kecamatan (%) 2022	105
Gambar 3.9	Capaian kemiskinan Kota Sukabumi dari tahun 2019-2024	109
Gambar 3.10	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sukabumi Tahun 2019 – 2024	110
Gambar 3.11	Persentase Realisasi Capaian SPM Tahun 2024	112
Gambar 3.12	Persentase Realisasi Anggaran Untuk Setiap Bidang.....	112
Gambar 3.13	Permasalahan Penerapan SPM	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan yang terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke daerah disusun secara berjangka. Adapun dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen RPJMD, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya. RKPD ini adalah rencana program dan/atau kegiatan yang merupakan hasil persandingan usulan dari masyarakat dengan usulan dari tingkat perangkat daerah yang mengacu kepada RPJMD melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang).

Dokumen RKPD sebagai penjabaran dari Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sukabumi Tahun 2025; dan menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.

Dokumen RKPD Tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang dalam proses penyusunannya diharapkan mampu

meningkatkan efektivitas dan efisiensi sasaran agenda prioritas nasional dan daerah yang dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Top down yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
2. Bottom-up yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Perangkat Daerah (FPD), dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan berupa matrik program dan kegiatan prioritas sampai dengan Acara Puncak Musrenbang RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2024.
3. Teknokratik yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan hasil kajian dan evaluasi periode sebelumnya berbasis pengetahuan, ilmu, dan teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan diakomodasinya saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan.
4. Politik yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan diakomodasinya Pokok-pokok Pikiran (Pokir) atau hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi.
5. Partisipatif yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
6. Kompetitif, yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan metode seleksi proposal usulan program dan kegiatan

dengan kriteria tertentu dan melalui beberapa tahapan seleksi.

7. Sosio-kultural, yaitu pendekatan yang memperhatikan aspek budaya daerah di Kota Sukabumi dan nilai-nilai kearifan lokal.
8. Pendekatan Perencanaan Holistik – Tematik pada dasarnya adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi multi kementerian dan antar Perangkat Daerah, yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas nasional yang didukung oleh Kementerian/Lembaga dan antar perangkat daerah di tingkat provinsi/kabupaten.
9. Pendekatan integratif dalam perencanaan pembangunan, lebih mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas yang terdapat pada suatu perangkat daerah dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas yang ada pada perangkat daerah lainnya dalam mendukung satu kebijakan prioritas.
10. Pendekatan spasial dalam tahapan perencanaan pembangunan, digunakan saat pembahasan guna menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa perangkat daerah untuk diintegrasikan yang selanjutnya akan diselaraskan dengan usulan dari kabupaten/kota.

Selain pendekatan di atas, penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 juga menerapkan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi, yaitu:

1. Kolaborasi Pemangku Kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan Pentahelix – ABCGM (Academic, Business, Community, Government, and Media).
2. Kolaborasi Pendanaan Pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Dana Masyarakat/umat,

Pinjaman Daerah, CSR, KPBU dan Obligasi Daerah.

3. Penerapan Dynamic Government sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Sinkronisasi Aplikasi dan Interkoneksi Data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, proses penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan berpedoman kepada sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, Forum Perangkat Daerah Tingkat Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat, hasil evaluasi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 dan 2024, dan secara simultan dilakukan telaahan rancangan Renja Tahun 2025 melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Rancangan RKPD dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari tahapan awal yang terdiri dari Musrenbang Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD atau Hasil reses DPRD serta Musrenbang Tingkat Kota.
3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025, melalui tahapan pembahasan prioritas bidang urusan oleh Bappeda, Perangkat Daerah, memperhatikan Pokok-pokok pikiran DPRD, serta pendapat dari kalangan akademisi, dunia usaha dan komunitas.
4. Penetapan RKPD, berpijak kepada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025, hasil Rapat Koordinasi Teknis dan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kota Sukabumi serta verifikasi akhir untuk program dan kegiatan prioritas untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025.

5. Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2025, akan terpengaruh dengan kegiatan Pelantikan Kepala Daerah terpilih, dimana pada tahun 2025 akan menjadi momentum penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang akan memuat visi dan misi Kepala Daerah terpilih.
6. Kondisi diatas memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2024.
7. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan I, realisasi kinerja dan anggaran masih rendah, hal tersebut disebabkan pelaksanaan program/kegiatan masih dalam tahap persiapan baru ada beberapa program/kegiatan di beberapa Perangkat Daerah pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV .
8. Evaluasi RKPD penting untuk dilaksanakan agar dapat memastikan target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional. Evaluasi RKPD dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah masing-masing, untuk kemudian disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Wali Kota sebagai bahan penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya. Evaluasi RKPD ini diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan Evaluasi RKPD, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

- Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) dan Perubahan PP Nomor 72 Tahun 2019;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 249);

21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 Seri E);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 59);
26. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);

29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
30. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026
31. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

RKPD merupakan rencana pembangunan tahunan yang bersifat aspiratif dan terpadu yang bersumber dari berbagai pelaku pembangunan agar tercipta pembangunan yang sinergi dan efisien. Penyusunan RKPD disesuaikan dengan alokasi sumber daya pembangunan yang dimiliki dan diharapkan akan memberi arah rencana kerja pembangunan di Tahun 2025 bagi Perangkat Daerah agar sesuai dengan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan renstra Perangkat Daerah terkait. RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 telah mempertimbangkan isu strategis yang diperkirakan akan mempengaruhi proses pembangunan di Tahun 2025, serta telah mempertimbangkan arah kebijakan dan target indikator kinerja pembangunan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kota Sukabumi Tahun 2025. Oleh sebab itu hasil pelaksanaan RKPD perlu ada pengendalian dan evaluasi.

Maksud dari evaluasi RKPD Tahun 2024 Triwulan I adalah untuk menilai dan mengevaluasi sebagai berikut:

1. Pencapaian target-target rencana program kegiatan perangkat daerah sesuai dalam RKPD Tahun 2025 Triwulan I;
2. Realisasi penyerapan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai dalam APBD Kota Sukabumi Tahun 2025 Triwulan I.

Tujuan dari evaluasi RKPD Tahun 2025 Triwulan I, adalah:

1. Memberikan gambaran progress pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan daerah per triwulan hingga akhir tahun 2025 sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2025 berdasarkan realisasi anggaran;

2. Memberikan gambaran realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah hingga akhir tahun 2025 sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2025;
3. Menjadikan pola tahapan evaluasi RKPD mulai triwulan I hingga triwulan IV sebagai sistem evaluasi yang harus dilakukan untuk mengendalikan pencapaian tujuan;
4. Menjadikan hasil evaluasi RKPD sebagai basis data untuk keperluan evaluasi-evaluasi lainnya.

1.4 Sistematika Penyajian Laporan

Dalam penyusunan dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2025 Triwulan I ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penyajian Laporan
2. BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI
 - 2.1. Tujuan dan Sasaran Kota
 - 2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
 - 2.3. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025
3. BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025 TRIWULAN I
 - 3.1. Capaian Kinerja Sasaran
 - 3.2. Capaian Kinerja Tematik (Stunting, Kemiskinan, SPM, dst)

- 3.3. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (dilengkapi dengan table Evaluasi RKPD)
 - 3.4. Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Propinsi dan Nasional
4. BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA
- 4.1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja
 - 4.2. Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya
5. BAB V PENUTUP
- 5.1. Kesimpulan
 - 5.2. Rekomendasi

BAB II

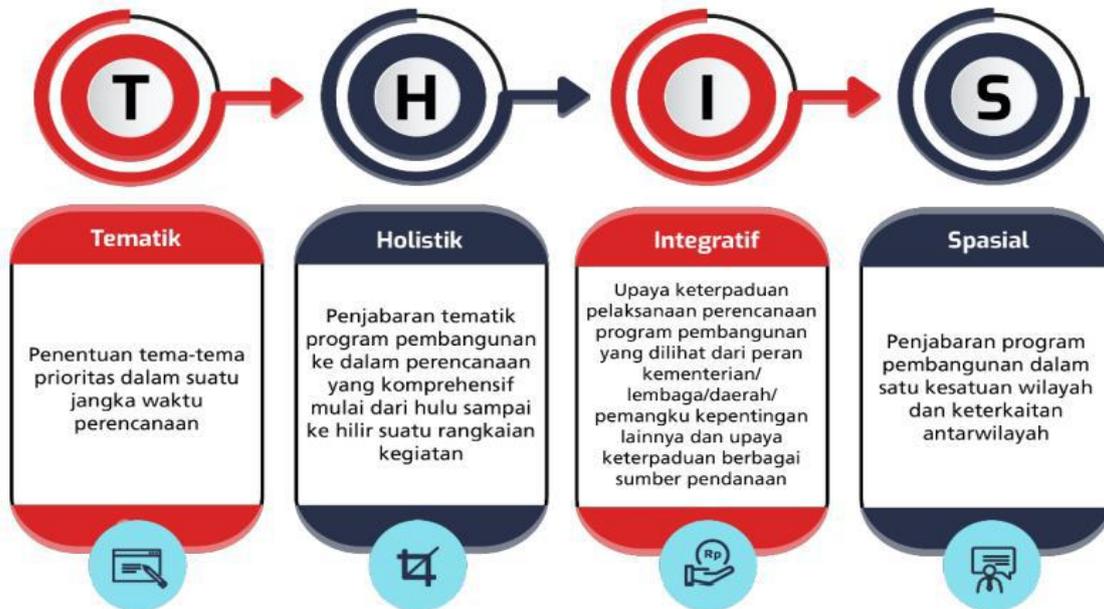
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

2.1 Tujuan dan Sasaran Kabupaten/Kota

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan adalah suatu kondisi yang akan atau diharapkan tercapai pada akhir periode sebuah dokumen perencanaan. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Daerah ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, kebijakan RPJMN dan RPD Provinsi serta isu-isu strategis pembangunan Daerah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil atau *outcome* program Perangkat Daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 merupakan tahap pembangunan tahun pertama dari RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026. Perencanaan pembangunan Kota Sukabumi menggunakan pendekatan substansi perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (T-H-I-S) yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Pendekatan perencanaan berbasis T-H-I-S



Sumber: Hasil Analisa Bappeda Kota Sukabumi, Tahun 2023

Pendekatan T-H-I-S tersebut secara implementatif dilakukan melalui:

1. Tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian program prioritas pembangunan daerah dengan 4 (empat) tujuan dan 9 (sembilan) sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026.
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas serta sasaran prioritas pembangunan Kota Sukabumi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow output priority program*) serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.
3. Menjaga dan memastikan semua tahapan perencanaan dilalui dengan baik dan benar serta tepat waktu dengan mengimplementasikan SIPD serta sistem digital lainnya yang terintegrasi.
4. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, baik dari pusat, provinsi, Kota Sukabumi, serta dari unsur pemerintah maupun swasta dan masyarakat.

5. Melibatkan peran aktif seluruh *stakeholder* baik dari pemerintah maupun di luar pemerintah seperti masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, komunitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam rangka mengukur keberhasilan pembangunan daerah Kota Sukabumi, maka ditetapkan sejumlah indikator makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah beserta targetnya yang nantinya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi tersebut akan menjadi gambaran riil mengenai kondisi dan perkembangan keberhasilan pembangunan daerah yang selanjutnya dapat dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pemerintah daerah Kota Sukabumi. Selain itu capaian lainnya seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), dokumen perencanaan strategis lainnya serta kondisi sosial dan ekonomi terutama akibat pandemi *Covid-19* tentunya akan tetap menjadi salah satu acuan bagi pengambilan keputusan pimpinan daerah.

2.1.1 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara nusantara, berdaulat, maju dan berkelanjutan yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi yaitu: pendapatan per kapita setara negara maju; kemiskinan menuju 0 (nol) persen dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; daya saing sumber daya manusia meningkat; serta intensitas emisi Gas Ruma Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.

Rencana pembangunan nasional tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui 5 (lima) penguatan fondasi transformasi sebagai berikut: transformasi sosial pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan

sosial; transformasi ekonomi hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktifitas tenaga kerja; transformasi tata kelola kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil; supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, memperkuat supremasi hukum dan stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketaguhan diplomasi, dan ketahanan sosial budaya dan ekologi memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN Tahun 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. Selanjutnya, pelaksanaan RPJMN Tahun 2025- 2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah. Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Untuk itu, "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" ditetapkan sebagai tema RKP Tahun 2025.

Pembangunan pada tahun 2025 akan difokuskan pada :

- 1) Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui (a) penetapan Wajib Belajar 13 Tahun; (b) restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan; (c) penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting; (d) penetapan Penggunaan Registrasi Sosial Ekonomi dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif; (e) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics berkualitas; (f) pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system; serta (g) penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (pendidikan budi pekerti).
- 2) Infrastruktur Berkualitas melalui (a) penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan

pertumbuhan ekonomi, (b) penguatan infrastruktur digital, (c) pengembangan infrastruktur transisi energi, (d) Percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, serta (e) penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

3) Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui:

- a) Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- b) pengembangan skema graduasi bantuan sosial;
- c) peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;
- d) peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;
- e) peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja;
- f) percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan;
- g) peningkatan produksi industri pengolahan;
- h) dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; serta
- i) penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Pembangunan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPD 2024-2026 memiliki tema “Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat” untuk mewujudkan tema tersebut maka dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Adapun tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Akses Pendidikan masyarakat;

2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat;
4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Pembangunan Pemuda;
5. Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk.

Tujuan 2 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan;
2. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah;
3. Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum;
4. Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja.

Tujuan 3 Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur;
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur;
3. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
5. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana.
6. Meningkatnya Pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.

Tujuan 4 Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah , dengan sasaran:

1. Meningkatnya Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
2. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
3. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

Penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 tentu harus disertai dengan target indikator yang telah ditentukan sehingga menjadi tolak ukur dari keberhasilan pencapaian pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		SATUAN	TARGET	
							2023	2024
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing			Indeks Pembangunan Manusia		Poin	73,34	73,56
		1.1	Meningkatnya Akses Pendidikan masyarakat	a.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,91	9,03
				b.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,69	12,75
		1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	a.	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,71	73,90
				b.	Prevelensi Stunting	Persen	19,20	15,52
		1.3	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	a.	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11.39	11.504
		1.4	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Pembangunan Pemuda	a.	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90,02	90,07
				b.	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	48,23	48,86
		1.5	Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk	a.	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,43	1,44
		2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan			Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persen
				Gini Ratio (poin)		Poin	0,410	0,408
				Persentase Penduduk Miskin		Persen	7,54	7,39

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		SATUAN	TARGET	
							2023	2024
		2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan	a.	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	6,00	5,76
				b.	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,45	4,53
		2.2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah	a.	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	4,45	4,50
				b.	Nilai Tuka Petani (NTP)	Poin	100,71	101,67
				c.	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	92,8	93,3
		2.3	Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	a.	Laju Pertumbuhan Pariwisata	Persen	26,35	26,87
		2.4	Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	521,78	532,22
				b.	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persen	22,00	23,34
				c.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,13	8,01
		3	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas dan			Indeks Kualitas Infrastruktur (poin)		Poin
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)						Poin	61,60	66,13
3.1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan			a.	Tingkat Konektivitas	Persen	47,00	57,00
				b.	Indeks Penggunaan Air	Poin	11,902	11,896

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		SATUAN	TARGET	
							2023	2024
	Lingkungan yang Berkelanjutan		infrastruktur kantong kemiskinan	c.	Konsumsi listrik per kapita	Kwh/kapita	1.15	1.466
				d.	Persentase rumah tangga hunian layak	Persen	53,9	54,47
				e.	Akses penanganan sampah di perkotaan	Persen	79,00	76,00
		3.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur	a.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	43,27	48,31
				b.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	75,5	90,07
				c.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	80,11	82,04
				d.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	38,90	42,64
4	Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah			Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat		Poin	81,32	82,14
				Indeks Reformasi Birokrasi		Poin	A	A
		4.1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	a.	Nilai aspek Kebebasan	Poin	91,31	92,11
				b.	Nilai aspek Kesetaraan	Poin	74,59	75,39
				c.	Nilai aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Poin	79,53	80,33
		4.2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	a.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	A	A
4.3	Peningkatan penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	a.	Indeks Inovasi Daerah	Poin	69,15 (Sangat Inovatif)	69,15 (Sangat Inovatif)		

Sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sesuai tabel di atas akan dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun selama periode RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024- 2026. Sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2024 yang ditetapkan pemerintah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sasaran. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dari dukungan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025

Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud untuk mengetahui kinerja utama dalam kurun waktu 2024-2026.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antarperiode, maka Pemerintah Kota Sukabumi dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan mempertimbangkan:

1. Visi dan misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025;
2. Analisis sasaran pokok dan arah kebijakan periode terakhir RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025; dan
3. Isu strategis aktual Kota Sukabumi.

Visi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Taqwa. Adapun misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang beriman, bertaqwa, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
4. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan amanah; dan
6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah.

Berdasarkan analisis sasaran pokok dan arah kebijakan periode terakhir RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, capaian pembangunan pada tahap ini ditandai dengan:

1. SDM yang semakin berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, dan berakhlak mulia;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan;
3. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat;
4. Meningkatnya IKM berkelanjutan dan perdagangan yang berdaya saing;
5. Meningkatnya kapasitas ASN dalam menjalankan roda pemerintahan; dan

6. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang terjangkau dan didukung sarana prasarana.

Berdasarkan irisan visi misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, dan isu strategis aktual, maka tujuan dan sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.2

Sandingan Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD, Isu Strategis Aktual serta Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

No	Misi RPJPD	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD	Isu Strategis Aktual	Tujuan RPD	Sasaran RPD
1	Mewujudkan SDM yang beriman, bertaqwa, dan berbudaya	SDM yang semakin berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, dan berakhlak mulia	Kualitas sumber daya manusia (SDM)	Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat ● Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ● Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
2	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan			
3	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat			
4	Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor	Meningkatnya IKM berkelanjutan dan	<ul style="list-style-type: none"> ● Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa ● Dampak proyek 	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor

No	Misi RPJPD	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD	Isu Strategis Aktual	Tujuan RPD	Sasaran RPD
	lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi	perdagangan yang berdaya saing	strategis nasional (PSN) dan mega proyek lainnya		perdagangan dan jasa
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan amanah	Meningkatnya kapasitas ASN dalam menjalankan roda pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> ● Inovasi di pemerintahan ● Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	<ul style="list-style-type: none"> ● Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis ● Meningkatnya inovasi daerah
6	Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah	Terpenuhinya kebutuhan hunian yang terjangkau dan didukung sarana prasarana	Permukiman kumuh, lingkungan hidup, dan kebencanaan	Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ● Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas ● Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023 (hasil analisis)

Adapun secara rinci tujuan, sasaran, outcome, indikator kinerja abeserta targetnya sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Tujuan:						
Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,35	5,31	5,33	5,37
Sasaran:						
Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	Persen	3,80	4,00	4,20	4,40
Outcome:						
Meningkatnya iklim usaha yang kondusif	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	69,3	80	82	85
Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persen	4,88	5,88	6,38	6,88
	Persentase ketersediaan pangan pokok	Persen	100	100	100	100
Mewujudkan UMKM dan wirausaha naik kelas yang mampu bersaing dipasar domestik dan global	Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persen	0,01	0,01	0,02	0,03
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan	Persen	20	40	60	80

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Meningkatnya promosi produk lokal	Persentase promosi produk lokal yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100
Sasaran:						
Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks Kota Kreatif	Poin	29,43	30,93	32,43	33,95
Outcome:						
Meningkatnya kegiatan ekonomi kreatif masyarakat	Nilai tambah ekonomi kreatif	Persen	14	16	19	22
Meningkatnya daya tarik wisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	21,78	21,80	21,90	22
	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen	4	4	6	7
Tujuan:						
Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,40	75,55	75,75	75,80
Sasaran:						
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	71,55	71,58	71,68	71,77
Outcome:						
Terpenuhinya SPM Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Persen	88.93	100	100	100

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Meningkatnya literasi masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	65.34	70.5	71	72
Sasaran:						
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi	Poin	0,31	0,33	0,35	0,37
Outcome						
Terpenuhinya SPM Kesehatan	Indeks Pencapaian SPM Kesehatan	Persen	88.93	100	100	100
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Prevalensi stunting pada balita	Persen	6,28	6	5,75	5,5
	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Persen	100	100	100	100
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persen	13,64	15,88	18,16	20,44
Meningkatnya kepesertaan JKN	Persentase kepesertaan JKN	Persen	98,43	98,5	98,6	98,7
Meningkatnya pembinaan keluarga berencana	Persentase keluarga yang mengikuti program KB	Persen	64,24	65	65,5	66
Sasaran:						
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Pekerja	30,899	34,001	35,769	37,736
Outcome:						
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	80	81	82	83

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	80	85	87,5	90
Tujuan:						
Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Poin	64,50	65,00	65,25	65,50
Sasaran:						
Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	85,20	86,00	86,20	86,50
Outcome:						
Meningkatnya konektivitas wilayah	Tingkat kemantapan jalan kota	Persen	84,54%	85	86	87
	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU	Persen	82,85	83,54	83,87	84,2
Meningkatnya pengelolaan sampah dan sanitasi	Cakupan pengelolaan sampah	Persen	99,55	100	100	100
	Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Persen	57,87%	58,30	58,73	59,16
Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Persentas berkurangnya jumlah RTLH	Persen	100,00%	69.44	38.88	0.69
	Luasan pengurangan kawasan kumuh	Ha	19,79	15	20	15
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kenyamanan	Predikat	Nyaman	Nyaman	Nyaman	Nyaman
	Indeks RTH	m2/orang	25	25,5	26	26,5

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Sasaran:						
Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Rasa Aman	Persen	75,31	75,40	75,55	75,60
Outcome:						
Terpenuhinya SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal trantibmas	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama	Persentase Konflik Antar Inter Umat Beragama yang terselesaikan	Poin	100	100	100	100
Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan penanganan resiko banjir dan longsor	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir dan longsor yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir WS kewenangan kota	Persen	57,32%	62,18	67,03	71, 89
Terpenuhinya SPM bagi warga di kawasan rawan bencana dan warga korban bencana	Persentase pemenuhan SPM sub urusan bencana bagi daerah rawan dan korban bencana	Persen	53	55	56	57
Terpenuhinya SPM kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap bencana bagi korban bencana	Persentase pemenuhan SPM kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persen	100	100	100	100
Tujuan:						
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Indek Reformasi Birokrasi	Poin	71,05	73,00	74,00	75,00
Sasaran:						
	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	71,05	73,00	74,00	75,00

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis						
Outcome:						
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai standar	Persen	100	100	100	100
	Persentase pencapaian IKU	Persen	100	100	100	100
	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dan tingkat kota	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	Persen	96,67	97,33	97,66	98
Meningkatnya kapasitas ASN	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kompetensi	Persen	7,68	7,9	8,0	8,5
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	Persentase penyelenggaraan pengadaan yang dilakukan secara online	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti	Persen	45	76	77	78
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang Ditindaklanjuti	Persen	45	80	81	82
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kebijakan publik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100	100
	Persentase koordinasi dan fasilitasi produk hukum daerah	Persen	100	100	100	100

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
	Persentase propempera yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Persentase pengelolaan aplikasi informatika yang digunakan dalam pemerintahan	Persen	90	93	95	97
Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan	Persen	100	100	100	100
Sasaran:						
Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
Outcome:						
Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan Iptek	Persentase instansi/lembaga yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	100	100	100	100

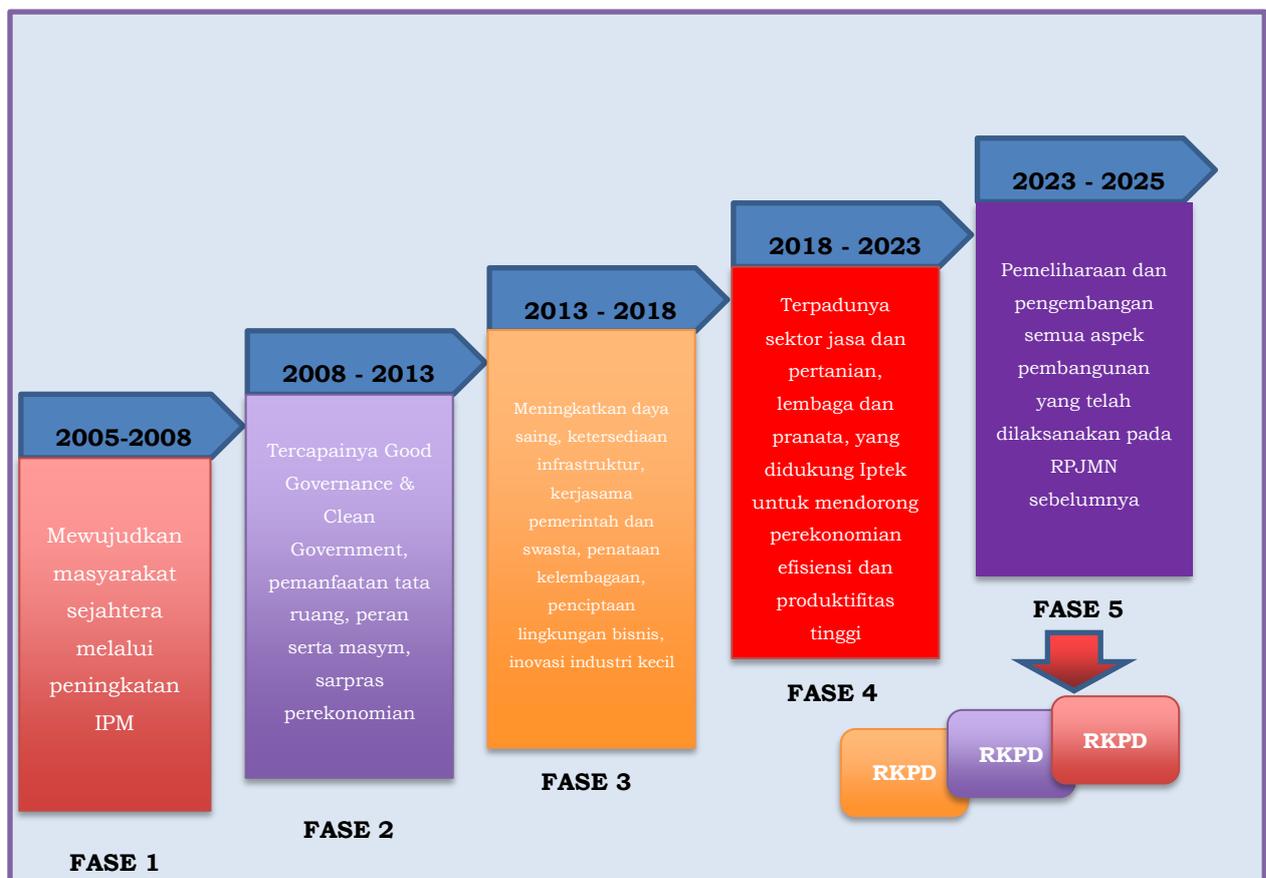
Sumber: Hasil Analisa Bappeda Kota Sukabumi, Tahun 2023

2.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Pelaksanaan pembangunan daerah periode tahun 2023-2025 merupakan tahap pembangunan kelima atau terakhir dari RPJPD Kota Sukabumi tahun 2005 - 2025 yang memiliki tema “**Pemeliharaan dan Pengembangan Semua Aspek Pembangunan yang Telah Dilaksanakan pada RPJM sebelumnya**”. Tema pembangunan tersebut menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan RPD yang lebih lanjut akan dijabarkan dalam tema pembangunan setiap tahun dan menjadi pedoman bagi penentuan fokus atau tema pembangunan dalam RKPD tahun 2024 - 2026. Tema pembangunan lima tahunan dalam setiap periode RPJPD disajikan pada Gambar 2.2

Gambar 2.2

Tema Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD dan Penjabarannya ke dalam RKPD



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023 (hasil analisis)

Rumusan arah kebijakan untuk merasionalkan pilihan strategi harus memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan setiap tahun selama periode RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3

Tema atau Fokus Pembangunan Tahunan Periode 2024-2026



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023 (hasil analisis)

Tema atau fokus pembangunan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Kota Sukabumi dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahunan untuk perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan RPD. Tema pembangunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, adalah:

“Meningkatkan kondusifitas kota untuk keberlangsungan pembangunan”

Tema di atas memiliki makna bahwa pada tahun 2024 merupakan tahun politik dimana pemilu dan pilkada serentak dilaksanakan. Situasi politik yang cenderung meningkat perlu diantisipasi dengan tetap menjaga dan meningkatkan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik agar keberlangsungan pembangunan tetap terjaga.

Tema tersebut sejalan dengan tema RKPD Provinsi Jawa Barat yaitu **Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat** serta telah selaras juga dengan tema RKP yaitu **Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Pada prinsipnya ketiga tema tersebut bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan melalui upaya penciptaan kondusifitas serta percepatan pembangunan ekonomi sehingga dapat mencapai masyarakat yang mandiri, unggul dan sejahtera.

Dalam pelaksanaan tema diatas, maka harus disandingkan dengan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan daerah sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dilakukan analisis berdasarkan sasaran dan isu strategis RPD, hasil evaluasi RKPD serta kebijakan Provinsi dan Nasional, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi tahun 2024 sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4**Penentuan Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi**

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum dioptimalkan	Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai penopang perekonomian	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa
			Mengkapitalisasi potensi ekonomi kreatif sebagai penopang perekonomian	
Ketersediaan pasar rakyat dan sarana distribusi belum optimal			Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	
Belum berkembangnya sistem terpadu monitoring serta koordinasi ketersediaan dan harga bahan pokok				
Belum optimalnya pembinaan PKL				
Tingginya alih fungsi lahan termasuk LP2B				
Minat masyarakat untuk bertani makin berkurang				

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
Distribusi bibit tanaman hortikultura belum optimal				
<i>Urban farming</i> belum menjadi gerakan masif dalam mendukung ketahanan pangan				
Belum optimalnya standarisasi budidaya perikanan				
Fasilitasi pelaku olahan hasil perikanan belum optimal				
Belum optimalnya manajemen koperasi				
Belum optimalnya pola kemitraan antara koperasi dan UMK dengan pengusaha besar				
Kurangnya promosi produk usaha mikro				
Belum optimalnya fasilitasi perizinan bagi usaha mikro				
Belum tersedianya database koperasi dan usaha mikro				

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
Investasi sektor industri belum menarik minat investor			Meningkatkan iklim usaha yang kondusif	
Potensi investasi belum digali secara optimal				
Rendahnya IKM produktif				
Pemanfaatan teknologi bagi industri kecil masih rendah				
Pemasaran produk IKM yang masih terbatas				
Luas wilayah relatif kecil	Dampak PSN dan megaprojek lainnya	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Peningkatan Kondusifitas Kota
Belum optimalnya Kota Sukabumi sebagai PKW				
Adanya disparitas pembangunan infrastruktur				
Belum optimalnya pengelolaan air bersih				
Belum optimalnya pengelolaan air limbah				

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
Belum disusunnya RDTR				
Fasilitas RTH publik yang belum optimal				
Masih adanya RTLH	Permukiman kumuh, lingkungan hidup dan kebencanaan		Meningkatkan pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman	
Permukiman kumuh belum sepenuhnya tertangani			Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	
Degradasi lingkungan				
Alih fungsi lahan yang terus berlangsung				
Belum optimalnya pengelolaan persampahan				
Kepedulian masyarakat akan lingkungan hidup masih kurang				
Risiko bencana gempa bumi, tanah longsor, dan banjir cukup besar		Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Meningkatkan kapasitas penanggulangan dan penanganan bencana	
Belum adanya peralatan untuk				

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
mendeteksi bencana				
Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan masih belum optimal	Pemilu dan pilkada serentak 2024	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Meningkatkan situasi kota yang kondusif	Peningkatan Kondusifitas Kota
Konflik sosial masih sering terjadi				
Ormas dan LSM masih banyak yang belum tertib administrasi				
Masih terdapat anak di bawah umur yang tergabung dalam Ormas dan LSM				
Adanya kesenjangan terkait distribusi kekayaan, produktivitas tenaga kerja, akses ekonomi, dan ketahanan dalam menghadapi goncangan	Kualitas SDM	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan masyarakat	
Akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat miskin perlu ditingkatkan				

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
Komponen daya beli masyarakat sebagai pembentuk IPM perlu ditingkatkan				
Angka putus sekolah perlu ditekan				
Angka melanjutkan sekolah antarjenjang pendidikan perlu ditingkatkan				
Lapangan kerja yang terbatas menyebabkan penyerapan tenaga kerja juga terbatas		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	
Asupan gizi masyarakat perlu ditingkatkan		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu kesehatan masyarakat	
Angka kesakitan masyarakat perlu ditekan				
Terdapat 4 kelurahan yang memiliki angka prevalensi <i>stunting</i> tinggi				
Pelayanan umum di beberapa	Inovasi di pemerintahan	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
kecamatan masih belum optimal		pemerintahan yang dinamis	penguatan 8 area perubahan	Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif
Rekomendasi oleh APIP belum sepenuhnya ditindaklanjuti PD		Meningkatnya inovasi daerah	Penguatan ekosistem inovasi	
Evaluasi program oleh APIP belum sepenuhnya dilakukan			Meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan IPTEK	
Belum idealnya jumlah ASN				
Penghapusan tenaga honorer				
Belum tersedianya data center				
Terbatasnya pemahaman, pemanfaatan, dan penggunaan teknologi informasi				
Belum optimalnya pengamanan informasi				
Belum semua arsip didigitalisasi				
Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan kebutuhan data statistik sektoral				

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
Partisipasi dan distribusi data dari pengguna/PD terhadap kebutuhan pengguna data yang berkualitas sangat rendah				

Sumber: Analisis Bappeda, 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kondusifitas Kota

Tahun 2024 merupakan tahun politik dimana pemilu dan pilkada serentak dilaksanakan. Situasi politik yang cenderung meningkat perlu diantisipasi dengan tetap menjaga dan meningkatkan kondusifitas dan stabilitas kota dari berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, keamanan dan politik. Hal tersebut agar keberlangsungan pembangunan tetap bisa terjaga dan masyarakat dapat melakukan aktivitas dan kreatifitas sebagaimana biasanya.

2. Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa

Sesuai dengan Visi RPJPD bahwa Kota Sukabumi sebagai pusat peragangan dan jasa yang berkualitas, maka kedua sektor ini harus terus menjadi prioritas dalam pembangunan. Sektor perdagangan dapat dioerkuat juga dengan optimalisasi sektor pariwisata yang nantinya tentu akan berdampak pada meningkatkan sektor perdagangan. Sektor jasa di bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya tentu harus tetap menjadi prioritas, karena memang itu sebuah keunggulan dan kelebihan yang dimiliki oleh Kota Sukabumi.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif

Pelayanan publik merupakan sebuah kewajiban pemerintah daerah

kepada masyarakat, untuk itu maka seluruh jenis pelayanan publik harus terus ditingkatkan kualitasnya. Pelayanan publik merupakan salah satu bagian dari agenda reformasi birokrasi yang juga harus senantiasa di implementasikan oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dimana didalamnya terdapat pelayanan publik maka harus dilakukan secara kreatif dengan berbagai inovasi di perangkat daerah sehingga dapat meningkatkan indeks reformasi birokrasi serta juga indeks inovasi daerah yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Selain prioritas pembangunan daerah, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran telah ditentukan juga program prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 yang disusun berdasarkan isu strategis, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Program prioritas pembangunan daerah menjadi pelaksanaan dari strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Program prioritas pembangunan daerah disajikan berdasarkan tujuan, sasaran dan *outcome* dari RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Dengan sifat program prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya harus diutamakan.

Perumusan program prioritas bertujuan untuk menggambarkan rangkaian “kerja” yang dibutuhkan untuk mencapai “kinerja” tujuan dan sasaran pembangunan. Program prioritas tersebut dihasilkan melalui mekanisme *cascading* tujuan, sasaran, dan *outcome* pembangunan. Proses perumusan program prioritas melalui mekanisme *cascading* dinilai lebih logis dan lebih dapat menjaga kesinambungan tujuan dan sasaran dengan program prioritas yang dihasilkan.

Berdasarkan *cascading* yang dilakukan, program prioritas Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 terdiri dari 41 program. Program prioritas yang dihasilkan juga telah disesuaikan dengan daftar program menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program prioritas Kota Sukabumi tahun 2024 - 2026 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Program Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Meningkatnya iklim usaha yang kondusif	Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
		Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Diskumindag
			Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKP3
		Mewujudkan UMKM dan wirausaha naik kelas yang mampu bersaing dipasar domestik dan global	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskumindag
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Diskumindag
		Meningkatnya promosi produk lokal	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Diskumindag
	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kegiatan ekonomi kreatif masyarakat	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Disporapar

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB	
		Meningkatnya daya tarik wisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disporapar	
			Pemasaran Pariwisata	Disporapar	
Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Terpenuhinya SPM pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Disdikbud	
		Meningkatnya literasi masyarakat	Pembinaan Perpustakaan	Dispusip	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terpenuhinya SPM kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	
		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan			
		Meningkatnya kepesertaan JKN			
		Meningkatnya pembinaan keluarga berencana	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dalduk KB P3A	
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Disnaker	
	Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya konektivitas wilayah	Penyelenggaraan Jalan	DPUTR
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				Dishub	
Meningkatnya pengelolaan			Pengelolaan Persampahan	DLH	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
		persampahan dan sanitasi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUTR
		Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPUTR
			Kawasan Permukiman	DPUTR
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH
	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Terpenuhinya SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP Damkar
		Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesbangpol
		Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan penanganan resiko banjir dan longsor	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUTR
		Terpenuhinya SPM bagi warga di kawasan rawan bencana dan warga korban bencana	Penanggulangan Bencana	BPBD
		Terpenuhinya SPM kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap	Penanganan Bencana	Dinsos

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
		bencana bagi korban bencana		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
		Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD
		Meningkatnya kapasitas ASN	Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	Perekonomian dan Pembangunan	Setda-BPBJ
		Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan kebijakan publik	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Setda-Organisasi
			Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda-Hukum
Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Setwan			

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
		Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Aplikasi Informatika	Diskominfo
		Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
	Meningkatnya inovasi daerah	Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan Iptek	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda

Sumber: RPD Kota Sukabumi 2024-2026

Prioritas pembangunan dan program prioritas ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024 dengan isu strategis pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan dan Program
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	1) Pelayanan Penanaman Modal 2) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 3) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			4) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 5) Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 6) Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
2	Dampak PSN dan megaprojek lainnya	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	1) Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 2) Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 3) Pemasaran Pariwisata
3	Permukiman kumuh, lingkungan hidup dan kebencanaan	Peningkatan Kondusifitas Kota	1) Penyelenggaraan Jalan 2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 3) Pengelolaan Persampahan 4) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 5) Perumahan dan Kawasan 6) Permukiman Kumuh 7) Kawasan Permukiman 8) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 9) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 10) Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 11) Penanggulangan Bencana 12) Penanganan Bencana
4	Kualitas SDM	Peningkatan Kondusifitas Kota	1) Pengelolaan Pendidikan 2) Pembinaan Perpustakaan 3) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 4) Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 5) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 6) Penempatan Tenaga Kerja

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
5	Inovasi di pemerintahan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penelitian dan Pengembangan Daerah 2) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4) Pengelolaan Keuangan Daerah 5) Pengembangan Sumber Daya Manusia 6) Perekonomian dan Pembangunan 7) Penyelenggaraan Pengawasan 8) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 9) Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 10) Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 11) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 12) Aplikasi Informatika 13) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6	Pemilu dan pilkada serentak 2024	Peningkatan Kondusifitas Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2) Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Sumber: Hasil analisis Bappeda, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, maka apabila kita sandingkan antara isu strategis, prioritas pembangunan dan program prioritas terdapat keterkaitan yang sangat erat. Isu strategis yang selanjutnya menjadi prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dapat kita petakan diakomodir pada program prioritas yang mana, sehingga kita dapat memastikan bahwa isu strategis dan prioritas pembangunan yang bermula dari berbagai permasalahan dan kondisi terkini Kota Sukabumi dapat diselesaikan melalui berbagai program prioritas yang akan dijalankan pada Tahun 2024.

Tabel 2.7**Keterkaitan Prioritas Pembangunan, Program Priotas dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
1	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatkan pelayanan penanaman modal
		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Memberdayakan pelaku UMKM
		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatkan kualitas sarana perdagangan
		Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatkan penggunaan dan promosi produk lokal
		Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Memanfaatkan dan melindungi HKI
		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatkan obyek daya tarik wisata
		Pemasaran Pariwisata	Meningkatkan pemasaran wisata
		Pengelolaan Pendidikan	Meningkatkan pengelolaan pendidikan
		Pembinaan Perpustakaan	Meningkatkan literasi masyarakat

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat
		Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatkan pembinaan keluarga berencana (KB)
		Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan pelatihan tenaga kerja
		Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatkan penempatan tenaga kerja
2	Peningkatan Kondusifitas Kota	Penyelenggaraan Jalan	Meningkatkan kualitas jalan kota
		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
		Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan pengelolaan persampahan
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatkan pengelolaan sistem air limbah
		Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Mengurangi luas kawasan kumuh
		Kawasan Permukiman	Mengurangi RTLH
		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatkan pengelolaan keragaman hayati
		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
		Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatkan kerukunan umat beragama
		Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk meminimalkan risiko bencana
		Penanggulangan Bencana	Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana
		Penanganan Bencana	Meningkatkan kapasitas penanganan bencana
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatkan manajemen kinerja pemerintahan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi
		Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatkan transparansi pemerintahan
		Penyelenggaraan Pengawasan	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing
		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
		Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		Aplikasi Informatika	
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam inovasi
			Meningkatkan jejaring litbang dan inovasi
			Implementasi pemanfaatan inovasi

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2022

Pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026. Pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui berbagai program pembangunan yang ada di seluruh perangkat daerah juga melalui program prioritas pembangunan.

Dalam melaksanakan program prioritas pembangunan yang telah ditentukan, maka harus dilakukan mapping dengan program pembangunan yang dilaksanakannya serta dikaitkan dengan sasaran, indikator serta strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Kesesuaian sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, serta pagu anggaran pada perangkat daerah disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8

Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Instansi/Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan 1 “Peningkatan Kondusifitas Kota”

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 205	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran (Rp)	Instansi/Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Peningkatan Kondusifitas Kota	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	86,00	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas jalan kota	Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Persen	*86	9,978,398,545	DPUTR
									Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU	Persen	83.87		
							Meningkatkan kualitas penyelenggaraan	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	Persentase ruas jalan yang memenuhi	Persen	100	2,476,230,950	DISHUB

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 205	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran (Rp)	Instansi/Pera ngkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							lalu lintas dan angkutan jalan	Angkutan Jalan (LLAJ)	i standar PJU				
							Meningkatkan pengelolaan persampahan	Pengelolaan Persampahan	Cakupan pengelolaan sampah	Persen	100	1,443,901,500	DLH
							Meningkatkan pengelolaan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah RT yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	58.73	2,073,111,500	DPUTR
						Meningkatkan pembangunan lingkungan perumahan dan	Mengurangi RTLH	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Berkurangnya Jumlah RTLH	Persen	33.88	861,930,800	DPUTR

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 205	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran (Rp)	Instansi/Pera ngkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						permukiman							
							Mengurangi luas kawasan kumuh	Kawasan Permukiman	Luasan Pengurangan Kawasan Kumuh	Ha	20	4,162,266,243	DPUTR
						Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kenyamanan	Predikat	Nyaman	564,660,000	DLH
							Meningkatkan pengelolaan keragaman hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	indeks RTH	m2/orang	26	297,887,000	DLH
		Terciptanya rasa aman dan kesiapsiaga	Indeks Rasa Aman	Persen	75,40	Meningkatkan situasi kota yang kondusif	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Peningkatan Ketenteraman dan	Persentase pemenuhan standar	Persen	100	2,162,885,500	SATPOLPP DAMKAR

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 205	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran (Rp)	Instansi/Pera ngkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		aan bencana						Ketertiban Umum	pelayanan minimal trantibmas				
							Meningkatkan kerukunan umat beragama	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang terselesaikan	persen	100	420,381,000	KESBANGPOL
								Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan	Persentase Konflik Sosial Yang Diantisipasi	persen	100	3,039,197,600	KESBANGPOL

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 205	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran (Rp)	Instansi/Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Konflik Sosial					
						Meningkatkan kapasitas penanggulangan dan penanganan bencana	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk meminimalkan risiko bencana	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Longsor yang Terlindungi Infrastruktur Pengendalian Banjir WS Kewenangan Kota	Persen	67.03	2,954,684,000	DPUTR

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 205	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran (Rp)	Instansi/Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana	Penanggulangan Bencana	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal sub urusan bencana bagi daerah rawan dan korban bencana	Poin	56	522,965,500	BPBD
							Meningkatkan kapasitas penanganan bencana	Penanganan Bencana	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal kebutuhan dasar bagi	Persen	100	405,521,000	DINSOS

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 205	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran (Rp)	Instansi/Pera ngkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									korban bencana				
		Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	71,58	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan masyarakat	Meningkatkan pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	persen	100	16,640,645,700	DISDIKBUD Dewan Pendidikan PGRI
							Meningkatkan literasi masyarakat	Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	71	625,055,120	DISPUSIP

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 205	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran (Rp)	Instansi/Pera ngkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi	Poin	0,33	Meningkatkan akses dan mutu kesehatan masyarakat	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Kesehatan	persen	100	24,020,209,000	DINKES Forum Kota Sehat Organisasi Profesi Kesehatan
									Prevalensi stunting pada balita	persen	5.75		
									Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	persen	100		
									Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakredit	persen	18.16		

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 205	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran (Rp)	Instansi/Pera ngkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									asi paripurna				
									Persentas e kepeserta an JKN	persen	96.6		
							Meningkatkan pembinaan keluarga berencana (KB)	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentas e keluarga yang mengikuti program KB	persen	65.5	356,381,400	DALDUKKBP2 A
JUMLAH												73,006,312,358	

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

Tabel 2.9

Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Instansi/Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan 2 “Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa”

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran	Instansi/Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	Perse n	4,00	Meningkatkan iklim usaha yang kondusif	Meningkatkan pelayanan penanaman modal	Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Perse n	82	310,251,300	DPMPTSP
							Meningkatkan kualitas sarana perdagangan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan	Perse n	60	418,351,250	DISKUMINDAG
							Meningkatkan penggunaan dan promosi produk lokal	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Dilaksanakan	Perse n	100	74,000,000	DISKUMINDAG PT. Shopee PT Lazada KADIN HIPMI
							Memberdayakan pelaku UMKM	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Perse n	0.02	914,783,950	DISKUMINDAG PT. Shopee PT Lazada KADIN HIPMI

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran	Instansi/Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Mikro (UMKM)					
						Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	Menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	6.38	80,050,500	DISKUMINDAG
							Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan pokok	Persen	100	556,669,100	DKP3
		Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks Kota Kreatif	Poin	30,93	Mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai penopang perekonomian	Meningkatkan obyek daya tarik wisata	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Nilai tambah ekonomi kreatif	Persen	19	96,900,000	DISPORAPAR

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran	Instansi/Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Meningkatkan pemasaran wisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	21.90	325,320,000	DISPORAPAR
						Mengkapitalisasi potensi ekonomi kreatif sebagai penopang perekonomian	Memfaatkan dan melindungi HKI	Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Event	6	231,835,500	DISPORAPAR
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Pekerja	34,001	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan pelatihan tenaga kerja	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase	82	457,200,000	DISNAKER
							Meningkatkan penempatan tenaga kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persentase	87.5	85,000,000	DISNAKER
JUMLAH												3,550,361,600	

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

Tabel 2.10

Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Instansi/Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan 3 “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif”

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran	Instansi/Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	73,00	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penguatan 8 area perubahan	Meningkatkan manajemen kinerja pemerintahan	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sesuai Standar	Perse	100	3,114,254,000	BAPPEDA
									Persentase Pencapaian IKU	Perse	100		
								Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Tingkat Kota	Perse	100	4,194,088,500	BAPPEDA
							Meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan	Perse	97.66	14,572,738,507	BPKPD

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran	Instansi/Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kompetensi	Person	8	1,157,321,250	BKPSDM
							Meningkatkan transparansi pemerintahan	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti	Person	77	857,418,000	INSPEKTORAT
									Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang Ditindaklanjuti	Person	81		
							Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdayasaing	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pengendalian Pelaksanaan APBD	Person	100	541,978,100	SETDA
									Persentase Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan	Person	100		

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran	Instansi/Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Perekonomian Daerah				
									Persentase Penyelenggaraan Pengadaan yang Dilaksanakan secara Online	Persen	100		
								Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100	40,025,860,932	
									Persentase Perangkat Daerah yang Mengikuti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Menenuhi Aspek Penilaian	Persen	90		

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran	Instansi/Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Indeks Pelayanan Publik	Perse n	3.6		
								Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah	Perse n	100	12,547,899,808	SETDA
									Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perse n	90		
									Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Perse n	100		
								Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase propemperda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Perse n	100	18,252,597,200	SETWAN
								Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Perse n	100	1,845,192,200	KEC. CIKOLE

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran	Instansi/Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Pelayanan Publik					
									Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Person	100	1,409,187,900	KEC. GUNUNG PUYUH
									Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Person	97	1,261,455,750	KEC. CITAMIANG
									Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Person	88,25	1,598,887,550	KEC. WARUDOYONG
									Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Person	100	1,154,732,700	KEC. BAROS
									Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Person	100	1,508,114,000	KEC. LEMBURSITU
									Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Person	100	1,192,612,400	KEC. CIBEUREUM

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran	Instansi/Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Digunakan dalam Pemerintahan	Persen	95	370,562,000	DISKOMINFO
								Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan adminisrai kependudukan	Persen	100	370,562,000	DISDUKCAPIL
		Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Penguatan ekosistem inovasi	Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan litbang serta inovasi	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	770,564,975	BAPPEDA
							Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam inovasi						
							Meningkatkan jejaring litbang dan inovasi						

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran	Instansi/Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan IPTEK	Implementasi pemanfaatan inovasi						
Jumlah												106,773,340,297	

Sumber: Analiss Bappeda Kota Sukabumi Tahun 2024

Prioritas pembangunan juga harus senantiasa sinergis dan selaras untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan yang dilakukan Kota Sukabumi selaras dengan prioritas Provinsi Jawa Barat dan Nasional sehingga terjadi kolaborasi pembangunan di setiap wilayah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Tabel 2.11

Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi Tahun 2025

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Baru	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan

	Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		Membangun Desa
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.	Peningkatan Kondusifitas Kota	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, Serta Pengembangan Pariwisata
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan

	Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan		Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata
			Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Kondusifitas Kota	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

Keterkaitan sasaran pembangunan Kota Sukabumi dengan sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat serta sasaran pembangunan nasional Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12**Persandingan Keselarasan Sasaran Prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi Tahun 2024**

Sasaran RKPD Provinsi Tahun 2025		Sasaran RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025	
S1.1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus, serta Pendidikan informal dan inklusi	S4	Meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat
S1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	S3	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat
S1.3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	S1	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sector perdagangan dan jasa
S1.4	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan pemuda	S4	Meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat
S1.5	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	S3	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat
S2.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	S1	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sector perdagangan dan jasa
S2.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan ketahanan pangan daerah	S1	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sector perdagangan dan jasa
S2.3	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	S2	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

S2.4	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha serta meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	S5	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
S3.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	S6	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
S3.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kualitas lingkungan hidup	S6	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
S3.3	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah	S6	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
		S7	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana
S4.1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	S8	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
S4.2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	S8	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
S4.3	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	S9	Meningkatnya inovasi daerah

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

Apabila dilihat dari keterkaitan indikator sasaran prioritas nasional, indikator prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan indikator prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025 dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.13

Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Kota Sukabumi, Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Prioritas Nasional		Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2025	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2025
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	Indeks Reformasi Birokrasi
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Baru	2	Asia Power Index (Military Capability)		Indeks Rasa Aman
		3	Asia Power Index (Diplomatic)		

			Influence)		
		4	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya		Indeks Rasa Aman
		5	Prevalensi Ketidakcukup an Konsumsi Pangan (PoU)		
		6	Indeks Ketahanan Energi		
		7	Kapasitas tampungan air (m3/kapita)		
		8	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)		
		9	Rumah Tangga dengan Akses		

			Sanitasi Aman (%)		
		10	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global		
		11	Indeks Ekonomi Hijau		
		12	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
		13	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
		14	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
		15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
		16	Persentase Penurunan Emisi GRK	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

			- Tahunan (%) - Kumulatif (%)		
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	17	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
		18	Rasio Kewirausahaan (%)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
		19	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)		
		20	Rasio PDB Pariwisata (%)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	Indeks Kota Kreatif
		21	Devisa Pariwisata (miliar USD)	Kontribusi Pariwisata	Indeks Kota Kreatif

				terhadap PDRB(%)	
		2 2	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		Indeks Kota Kreatif
		2 3	Aset Perbankan/PDB (%)		
		2 4	Aset Dana Pensiun/PDB (%)		
		2 5	Aset Asuransi/PDB (%)		
		2 6	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)		
		2 7	Total Kredit/PDB (%)		
		2 8	Inklusi Keuangan (%)		
	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan	2 9	Hasil Pembelajaran: a. Rata-rata nilai PISA i. Membaca ii. Matematika iii. Sains	a. Rata-rata Lama Sekolah b. Rata-rata Lama Sekolah c. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	a. Indeks pendidikan b. Indeks pendidikan c. Indeks pendidikan

	Penyandang Disabilitas		<p>b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)</p> <p>c. Harapan lama sekolah (tahun)</p>		
		30	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	Rata-rata Lama Sekolah	Indeks Pendidikan
		31	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	Rata-Rata lama sekolah (Tahun)	Indeks Pendidikan
		32	<p>Tingkat Penguasaan Iptek:</p> <p>a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)</p>	b. Indeks Reformasi Birokrasi	b. Indeks Reformasi Birokrasi

			b. Peringkat Indeks Inovasi Global		
		3 3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
		3 4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		
		3 5	Usia Harapan Hidup (tahun)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
		3 6	Kesehatan Ibu dan Anak a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	a. Angka Harapan Hidup (Tahun) b. Prevalensi Stunting (%)	a. Indeks Keluarga Sehat Sukabumi b. Indeks Keluarga Sehat Sukabumi

		3 7	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
		3 8	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
		3 9	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
		4 0	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Poin)	Indeks Pendidikan
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	4 1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	Laju pertumbuhan sector industri (%)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
		4 2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)		Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB

		4 3	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	Laju pertumbuhan sector perdagangan(%)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
		4 4	Biaya Logistik (% PDB)		
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan kemiskinan	4 5	Terbangunnya system perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)		
		4 6	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerja an (%)		Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
		4 7	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)		
		4 8	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)		

		49	Persentase desa mandiri (%)		
		50	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	Persentase rumah tangga hunian Layak (%)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	51	Return on Asset (ROA) BUMN (%)		
		52	Indeks Integritas Nasional	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
		53	Indeks Materi Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
		54	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	Indeks Reformasi Birokrasi
		55	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi

		5 6	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
		5 7	Indeks Pembangunan Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	Indeks Reformasi Birokrasi
		5 8	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)		
		5 9	Tingkat Inflasi (%)		
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6 0	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	Indeks Reformasi Birokrasi
		6 1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	Indeks Reformasi Birokrasi
		6 2	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	Indeks Risiko bencana (Poin)	Indeks Rasa Aman

			Relatif terhadap PDB (%)		
--	--	--	--------------------------------	--	--

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

2.3 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahunan 2025

Secara umum program prioritas terkait erat dengan upaya pencapaian sasaran daerah, dimana sasaran daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai. Sasaran dijabarkan ke dalam indikator sasaran, yang dijabarkan kembali melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Dengan demikian, maka diharapkan sasaran daerah yang telah ditetapkan dapat dicapai dari akumulasi output setiap pelaksanaan sub kegiatan yang mendukung pencapaian output kegiatan serta selanjutnya mendukung pencapaian outcome program yang sudah ditentukan dalam dokumen perencanaan lima tahunan serta diterjemahkan dalam dokumen perencanaan tahunan. Daftar kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai berikut : (Daftar Dalam Buku II)

BAB III

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2024 TRIWULAN IV

Evaluasi pembangunan daerah pada buku ini menjelaskan tentang indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang kami sajikan adalah Capaian Kinerja Sasaran, Capaian Kinerja Tematik dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan.

Hasil Evaluasi akan memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi pembangunan daerah melalui data dan informasi yang menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024.

3.1 Capaian Indikator Makro

Indikator Makro	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
LPE	-1,49	3,71	5,35	5,12	N/A
TPT	12,17	10,78	8,83	8,53	8,34
IPM	74,21	75,44	76,24	77,16	77,69
Gini Ratio	0,40	0,44	0,48	0,45	N/A

Indikator Makro	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Kemiskinan	7,70	8,25	8,02	7,50	7,20
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	25,4	27,2	26,5	24,9	24,1

Sumber Data : BPS Tahun 2024

3.2 Capaian Kinerja Sasaran

3.2.1 Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang Inklusif

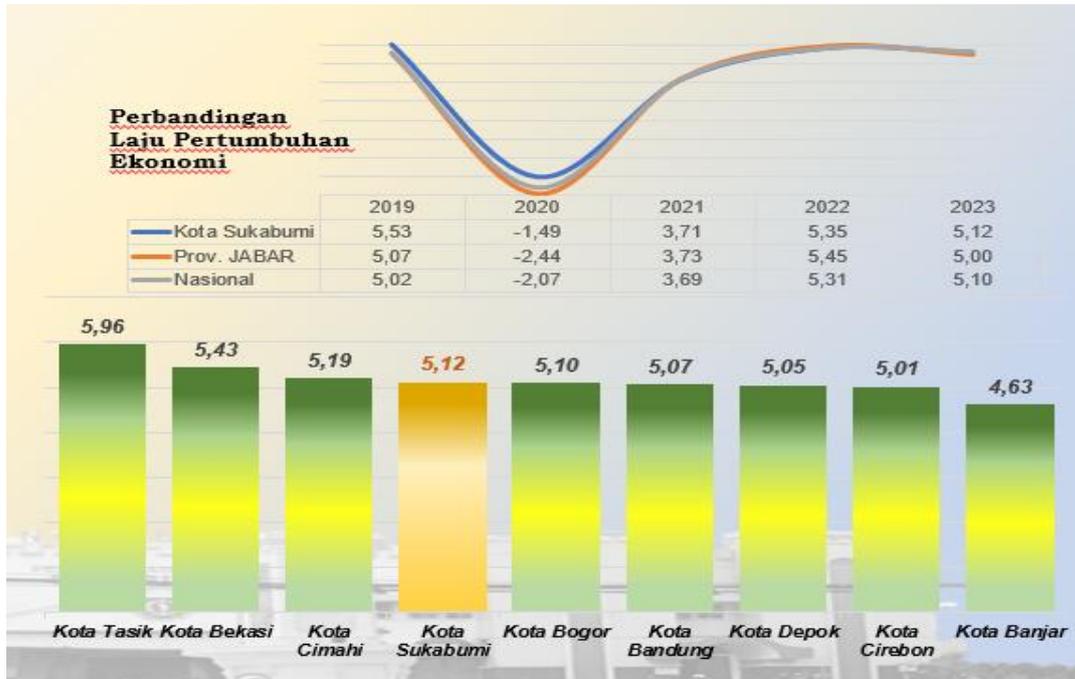
3.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian Kota Sukabumi tahun 2023 menunjukkan kinerja positif sehingga mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen walaupun mengalami penurunan sebesar 0,23 point di bandingkan dengan tahun 2022, akan tetapi geliat positif dalam perekonomian terjadi pada seluruh kategori perekonomian di Kota Sukabumi sepanjang tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 5,00 persen dan Nasional sebesar 5,05 persen, pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi tahun 2023 berada di atasnya dengan selisih masing-masing sebesar 0,12 point dan 0,07 point.

Sementara jika dibandingkan dengan 9 (sembilan) Kota di Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi berada di urutan ke 4 (empat) tertinggi setelah Kota Tasik, Bekasi dan Cimahi.

Gambar 3.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi



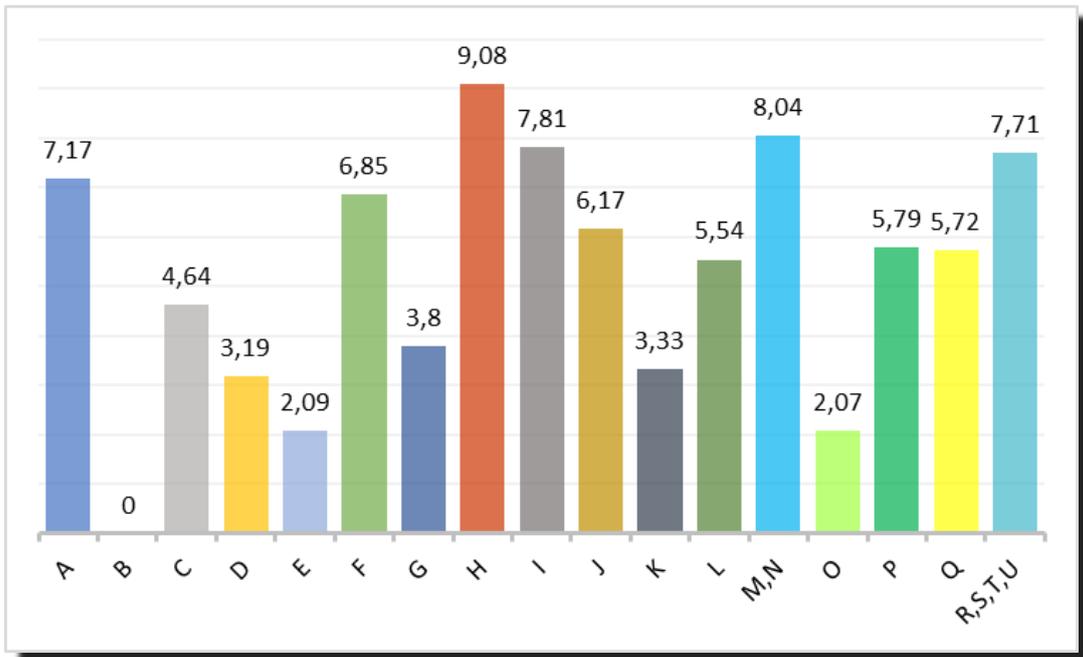
Sumber: BRS, No. 04/03/3272/Th IX, 15 Maret 2024 (Kota Sukabumi), BRS, No. 11/02/32/Th. XXVI, 5 Februari 2024 (Jawa Barat), BRS, No. 13/02/Th. XXVII, 5 Februari 2024 (Nasional)

3.2.1.2 Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB

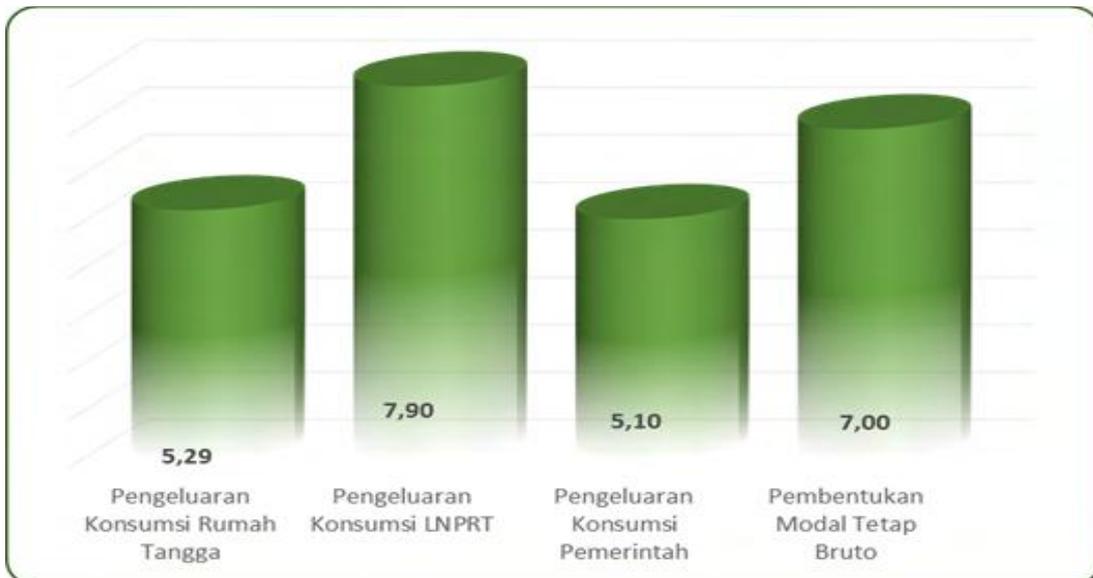
Perekonomian Kota Sukabumi tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku mencapai **15,35** triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai **9,80** triliun rupiah;

Ekonomi Kota Sukabumi tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar **5,12** persen dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh positif sebesar 5,35 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,08 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,90 persen.

Gambar 3.2
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2023 (persen)



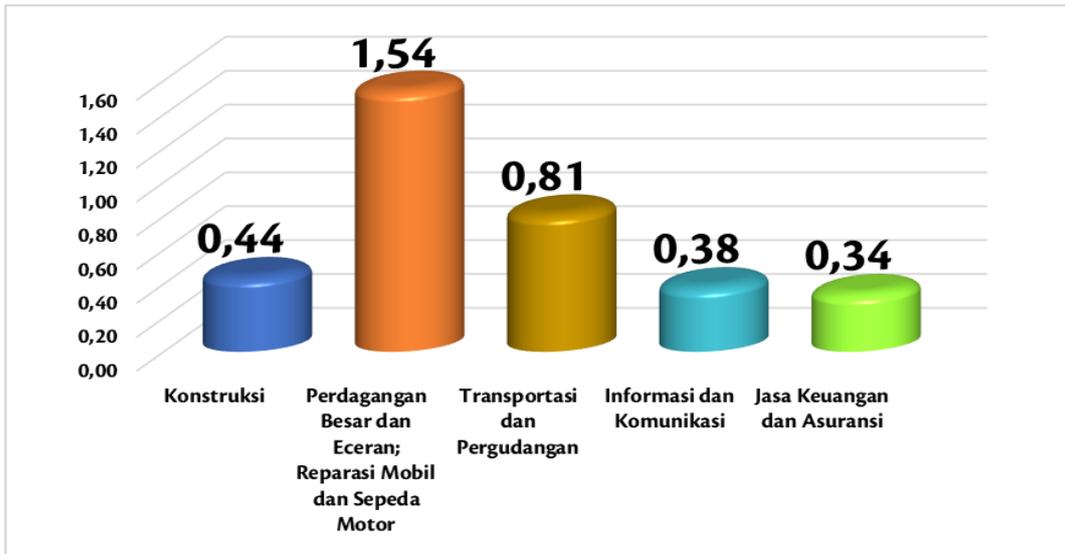
Gambar 3.3
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Pengeluaran
Tahun 2023 (persen)



Sumber : BRS, No. 04/03/3272/Th IX, 15 Maret 2024

Gambar 3.4

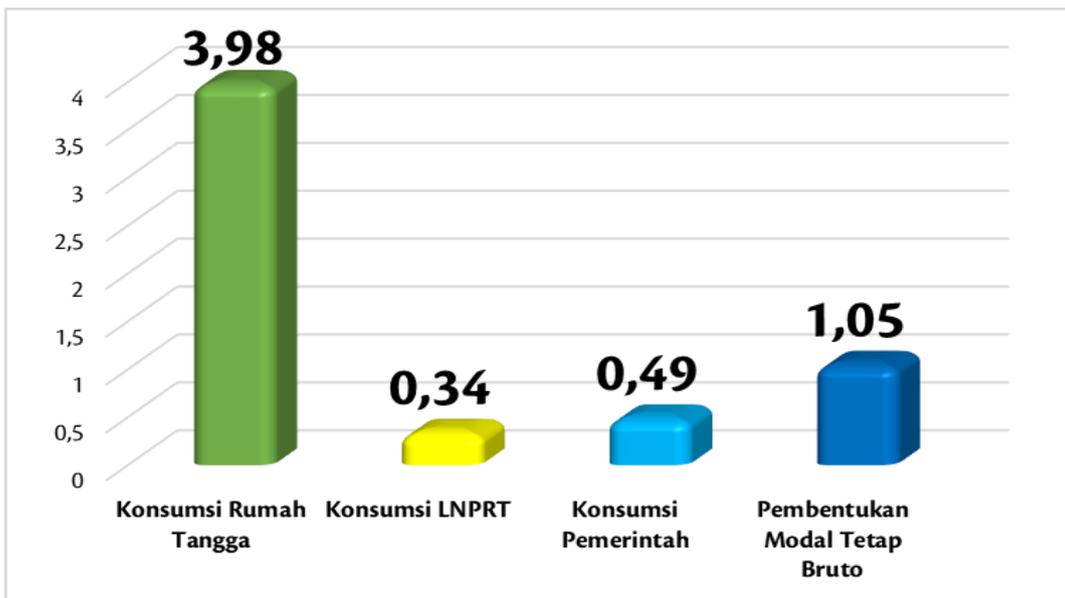
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (5 terbesar)



Sumber : BRS, No. 04/03/3272/Th IX, 15 Maret 2024

Gambar 3.5

Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran



Sumber : BRS, No. 04/03/3272/Th IX, 15 Maret 2024

Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2023 dari sisi lapangan usaha disumbangkan oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor dengan andil sebesar **1,54** persen. Adapun dari sisi pengeluaran,

sumbangan terbesar berasal dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar **3,98** persen.

Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi paling tinggi terhadap pembentukan PDRB Kota Sukabumi tahun 2023 yaitu sebesar **37,59** persen. Dari sisi pengeluaran, peranan terbesar disumbangkan oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar **81,49** persen.

Tabel 3.1

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha/ Industry		PDRBADHB			PDRBADHK 2010		
		2021	2022*	2023**	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	447,76	491,17	547,17	277,05	286,97	307,55
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	–	–	–	–	–	–
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	658,06	704,40	752,55	459,55	481,63	503,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	27,52	29,53	30,77	16,99	18,00	18,57
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	18,00	19,25	19,83	11,73	12,47	12,73
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	892,12	943,84	1.041,63	601,49	600,60	641,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	4.941,55	5.410,49	5.769,43	3.572,48	3.767,92	3.911,06
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1.391,72	1.541,49	1.763,39	777,52	836,52	912,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	385,49	436,87	483,20	247,78	271,81	293,05
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	556,42	588,91	625,56	534,52	571,97	607,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	1.522,26	1.624,98	1.720,80	934,62	958,67	990,62
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	153,33	169,07	180,11	116,52	123,86	130,72
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	228,98	255,45	279,41	145,66	158,96	171,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	583,17	580,24	600,15	329,32	328,20	334,99
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	585,18	640,08	695,88	344,12	371,97	393,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	256,39	283,83	308,44	181,55	199,43	210,84
RST,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	405,09	472,64	531,37	300,15	335,16	360,99
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		13.053,04	14.192,25	15.349,71	8.851,05	9.324,16	9.801,88

Tabel 3.2
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019 - 2023 (persen)

Lapangan Usaha/ Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1,73	0,62	0,76	3,58	7,17
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5,30	-1,93	2,49	4,81	4,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	2,95	2,99	8,98	5,90	3,19
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	5,60	6,85	8,02	6,32	2,09
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	7,09	-4,06	4,00	-0,15	6,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	4,69	-2,68	3,64	5,47	3,80
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	7,17	-6,98	3,41	7,59	9,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	7,01	-3,41	2,74	9,70	7,81
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	8,75	10,78	8,23	7,01	6,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	5,58	2,81	4,79	2,57	3,33
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	8,16	-0,86	7,76	6,30	5,54
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	7,37	-7,67	7,87	9,13	8,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	0,21	-3,93	-2,76	-0,34	2,07
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	6,34	4,39	2,88	8,09	5,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	7,49	1,82	7,82	9,85	5,72
R,S, T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	9,15	-0,82	1,42	11,67	7,71
Produk Domestik Regional Brut/ Gross Regional Domestic Product		5,53	-1,49	3,71	5,35	5,12

Tabel 3.3

Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (persen)

Lapangan Usaha/ Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	3,43	3,51	3,43	3,46	3,56
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5,10	5,04	5,04	4,96	4,90
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,21	0,20	0,21	0,21	0,20
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,12	0,13	0,14	0,14	0,13
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	7,05	6,80	6,83	6,65	6,79
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	38,65	38,02	37,86	38,12	37,59
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	10,76	10,51	10,66	10,86	11,49
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	3,02	2,93	2,95	3,08	3,15
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	3,74	4,17	4,26	4,15	4,08
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	10,94	11,43	11,66	11,45	11,21
L Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1,14	1,14	1,17	1,19	1,17
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	1,79	1,70	1,75	1,80	1,82
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	4,87	4,76	4,47	4,09	3,91
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4,11	4,50	4,48	4,51	4,53
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,82	1,89	1,96	2,00	2,01
R,S,T,U Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	3,22	3,25	3,10	3,33	3,46
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 3.4**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2021-2023 (miliar)**

Komponen Pengeluaran		PDRBADHB			PDRBADHK 2010		
		2021	2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2021	2022 ¹⁾	2023 ²⁾
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Konsumsi Rumah Tangga	10.421,22	11.406,85	12.508,19	6.661,37	7.022,52	7.393,92
2	Konsumsi LNPRT	568,41	626,53	700,43	376,61	402,50	434,30
3	Konsumsi Pemerintah	1.488,68	1.506,40	1.626,88	898,70	888,30	933,63
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.122,79	2.218,41	2.459,36	1.391,21	1.396,15	1.493,84
5	Perubahan Inventori	- 110,39	- 6,37	- 2,46	- 69,15	- 3,98	- 1,49
6	Ekspor Neto	- 1.437,66	- 1.559,58	- 1.942,70	- 407,68	- 381,33	- 452,32
Produk Domestik Regional Bruto		13.053,04	14.192,25	15.349,71	8.851,05	9.324,16	9.801,88

Keterangan: ¹⁾ Angka Sementara ²⁾ Angka Sangat Sementara

Tabel 3.5**Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran
Tahun 2021-2023 (persen)**

Komponen Pengeluaran		Laju Pertumbuhan ADHK 2010			Distribusi PDRBADHB		
		2021	2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2021	2022 ¹⁾	2023 ²⁾
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Konsumsi Rumah Tangga	3,63	5,42	5,29	79,84	80,37	81,49
2	Konsumsi LNPRT	1,88	6,87	7,90	4,35	4,41	4,56
3	Konsumsi Pemerintah	1,42	-1,16	5,10	11,40	10,61	10,60
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,45	0,36	7,00	16,26	15,63	16,02
5	Perubahan Inventori				-0,85	-0,04	-0,02
6	Ekspor Neto				-11,01	-10,99	-12,66
Produk Domestik Regional Bruto		3,71	5,35	5,12	100,00	100,00	100,00

Keterangan: ¹⁾ Angka Sementara ²⁾ Angka Sangat Sementara

3.2.2 Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif**3.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia**

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Pembangunan manusia

menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Tingkat kesejahteraan sosial dapat dilihat dari pembangunan manusia yang dilakukan. Keberhasilan pembangunan manusia terindikasikan oleh beberapa indikator kinerja, yang paling banyak dipakai adalah penggunaan indikator indeks pembangunan manusia atau IPM atau disebut juga *Human Development Index* atau *HDI* yang diperkenalkan oleh *United Nation Development Program (UNDP)* pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. Penyempurnaan metode penghitungan IPM oleh UNDP dilakukan secara berkala untuk memperoleh indikator yang lebih baik lagi dan relevan dalam mengukur pembangunan manusia. Perhitungan IPM ini mengacu kepada perhitungan BPS yang mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010. Pada tahun 2023 Hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF) digunakan sebagai dasar penghitungan Umur Harapan Hidup (UHH).

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak

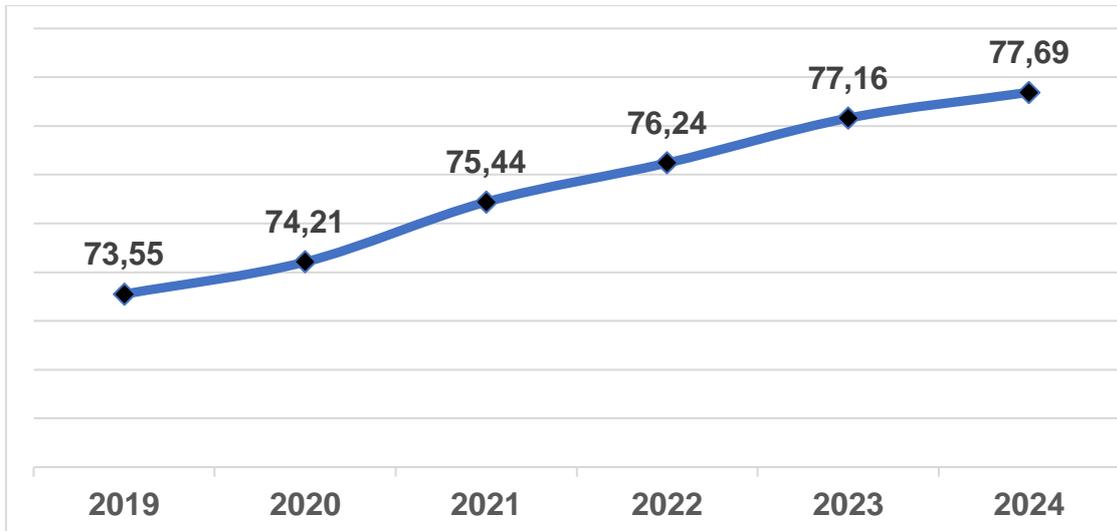
digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Pertumbuhan nilai IPM antar waktu akan menunjukkan kecepatan pembangunan yang terjadi sebagai cerminan atas upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Sementara status pencapaian IPM merefleksikan tingkatan pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode.

Pembangunan manusia di Kota Sukabumi terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2013, status pembangunan manusia Kota Sukabumi meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2020–2024 IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,87 persen per tahun, dari 77,16 pada tahun 2023 menjadi **77,69** pada tahun 2024.

Gambar 3.7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi
menurut Dimensi Penyusunnya, 2020-2023



Sumber data BPS Tahun 2024

3.2.3 Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan

Wilayah Kota Sukabumi terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dengan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan. Wilayah Kota Sukabumi berbatasan dengan beberapa Kecamatan di kabupaten Sukabumi, yaitu:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

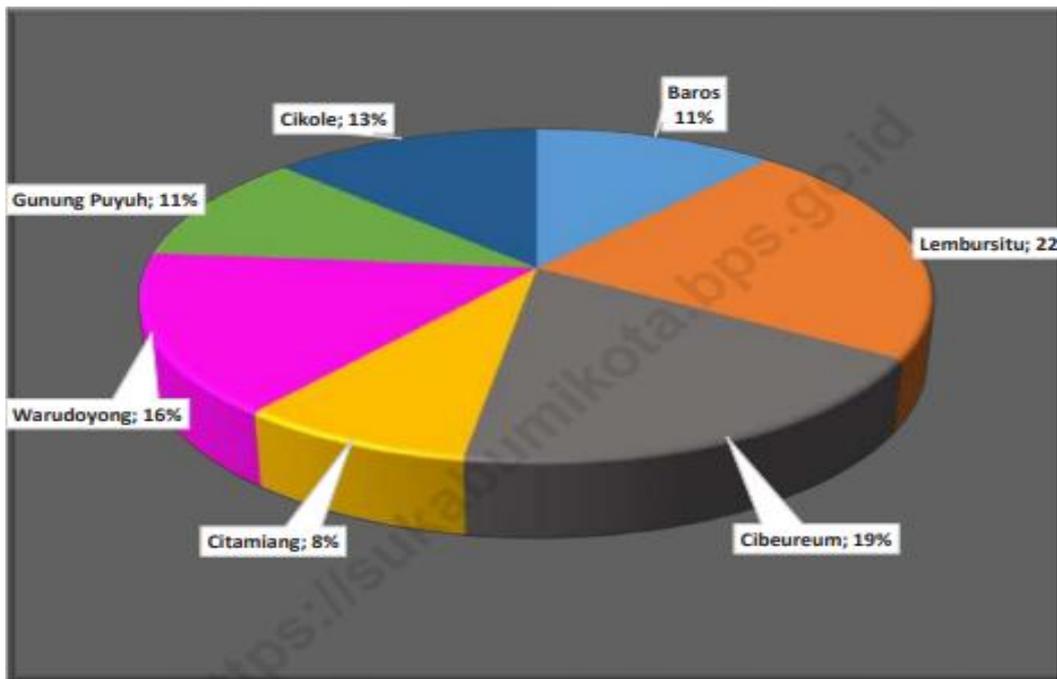
Wilayah administrasi Kota Sukabumi terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Gunungpuyuh, Kecamatan Cikole, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu dan Kecamatan Cibeureum. Jarak terjauh dari Balaikota Sukabumi adalah Kecamatan Lembursitu, yakni sejauh 7 km.

Luas dataran masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel dibawah ini sedangkan persentase luas wilayah Kota Sukabumi per Kecamatan disajikan pada gambar 3.8 berikut ini:

Tabel 3.6
Luas Dataran Kecamatan se-Kota Sukabumi

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Baros	5,58
2	Lembursitu	10,69
3	Cibeureum	9,12
4	Citamiang	4,01
5	Warudoyong	7,56
6	Gunungpuyuh	5,15
7	Cikole	6,22
Luas Total		48,33

Gambar 3.8
Luas Daerah Menurut Kecamatan (%) 2022



Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka , 2023

Letak Kota Sukabumi yang strategis yaitu berada pada jalur lintasan Ibukota Provinsi Jawa Barat dengan Ibukota Negara, serta didukung oleh

infrastruktur yang cukup memadai, menjadikan Kota Sukabumi sebagai salah satu tujuan para migran dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun sebagai pencari kerja.

Kota Sukabumi dianugerahi wilayah yang sejuk dengan infrastruktur kota yang sudah berdiri sejak dahulu kala. Namun, seperti karakteristik daerah perkotaan pada umumnya, Kota Sukabumi memiliki wilayah dengan luas yang terbatas, yakni 48,33 km², serta jumlah penduduk Tahun 2022 sebanyak 356.410 jiwa, kepadatan penduduk 7.375 jiwa/Km², dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,56%.

Tingkat kepadatan penduduk Kota Sukabumi tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi penduduk adalah sebesar 7.259 jiwa/km² Jika dirinci menurut kecamatan, Citamiang adalah kecamatan terpadat dan Cibeureum menjadi kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah. Di sisi lain rasio jenis kelamin penduduk Kota Sukabumi tahun 2021 berada di kisaran angka 101 yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Dengan melihat kondisi yang ada Pemerintah Kota Sukabumi berupaya mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan layak huni. Adapun capaian indikator Indeks Kota Layak Huni/Indeks Kenyamanan Kota Sukabumi terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7

Data Capaian Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni/Indeks Kenyamanan	23,45	22,91	22,46	23,82	65,74
Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	77	86,2	86,75	87,36	80,23
Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Rasa Aman	85,35	75,31	75,91	76,33	75,40

3.2.4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif

Dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan inovatif, dalam dilihat dari capai indikator-indikator dibawah ini :

Tabel 3.8
Data Capaian Indikator Tata Keleloa Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	68,25	67,91	71,05	74,78	N/A
Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Terinovatif (4675)	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif (65,74)	Sangat Inovatif

Untuk Capaian Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adala sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Indikator Tujuan/Sasaran (IKU RPD) Triwulan IV Tahun 2024

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ SASARAN)	SATUAN	BASELINE 2023	TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1		3				
I	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang Inklusif	Persen	5,12	5,37	N/A	N/A
a	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Persen	4,40	4	N/A	N/A
b	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi reatif	Poin	33,95	30,93	N/A	N/A

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ SASARAN)	SATUAN	BASELINE 2023	TAHUN 2024			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1		3					
II	Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	Indeks pembangunan Manusia	Poin	77,16	75,55	77,69	100
a	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	72,34	71,58	72,4	100
b	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Poin	0,34	0,33	0,35	100
c	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Pekerja	38	34,001	N/A	N/A
II	Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni/Indeks Kenyamanan	Poin	23,82	65,00	65,74	100
a	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Persen	87,36	86	80,23	100
b	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Rasa Aman	Poin	76,33	75,4	75,4	100
I	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	74,78	73	N/A	N/A
a	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	100

3.3 Capaian Kinerja Tematik (Stunting, Kemiskinan, SPM, dst)

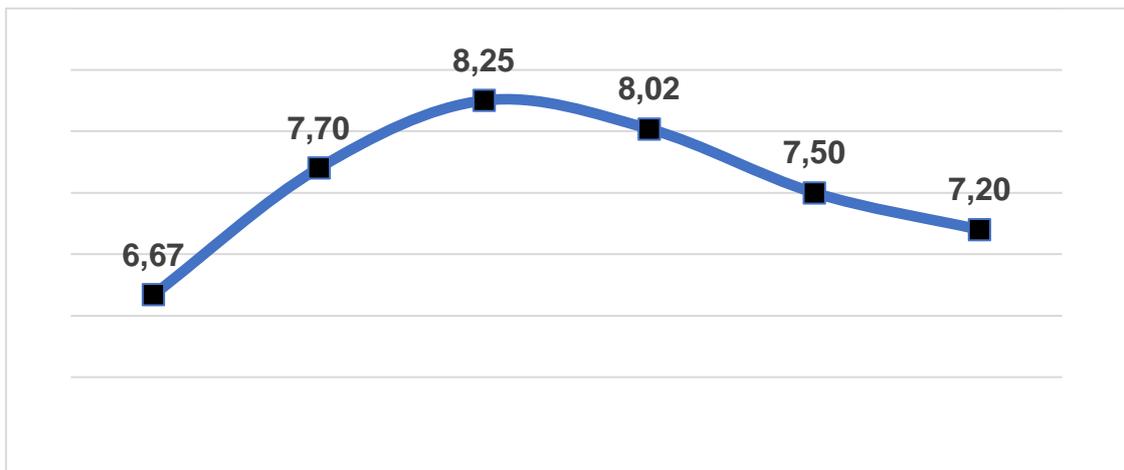
3.3.1 Kemiskinan

Kemiskinan di Kota Sukabumi cenderung meningkat pada tahun 2019 hingga 2021 sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia termasuk Kota Sukabumi. Namun, mulai tahun 2022-2024, tingkat

kemiskinan di Kota Sukabumi mulai cenderung menurun, hal ini tidak lepas dari upaya strategi dan kebijakan pemerintah Kota Sukabumi dalam menangani masalah kemiskinan pasca pandemi. Sehingga tingkat kemiskinan pada tahun 2024 turun 0,30 persen dari tahun 2023 sebesar 7,50 menjadi 7,20 persen, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 24,10 ribu jiwa.

Gambar 3.9

Capaian kemiskinan Kota Sukabumi dari tahun 2019-2024



Sumber: BPS, Badan Pusat Statistik, Tahun 2024 (data diolah)

3.3.1.1 INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, sebaliknya, penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sukabumi mengalami penurunan dibanding tahun 2023, menjadi **0,88**. Nilai tersebut berada dibawah IKK (P1) provinsi Jawa Barat yang nilai indeksnya sebesar 1,21.

Gambar 3.10

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sukabumi Tahun 2019 – 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Sukabumi, Tahun 2024

3.3.2 Stunting

Kota Sukabumi merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah 48,33 km². Kota Sukabumi tidak terlepas dari permasalahan serius terkait generasi penerusnya salah satunya yaitu permasalahan stunting.

Stunting, sebagai masalah kesehatan yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dalam jangka pendek maupun panjang, memerlukan penanganan serius.

Pada Tahun 2021 berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Sukabumi sebesar 19,1%. Tahun 2022 sebesar 19,2% berada di bawah provinsi dan nasional, dan pada Tahun 2023 sebesar 26,9%.

Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Kota Sukabumi masih berada pada angka 5,69% pada Februari 2024 dengan 1.065 balita stunted, dan meningkat menjadi 6,38% pada Juni 2024 dengan 1.291 balita. Kenaikan ini menunjukkan bahwa tantangan penurunan stunting masih signifikan.

Data dari SSGI tahun 2022 menunjukkan prevalensi stunting di Sukabumi sebesar 19,2%, dan meningkat menjadi 26,9% pada tahun 2023.

Kenaikan prevalensi stunting setiap tahunnya di Kota Sukabumi berdasarkan hasil analisa data 29 indikator stunting esential dan 35 indikator supply, terdapat beberapa penyebab di antaranya adalah Koordinasi dan kolaborasi, satu data sasaran, pendampingan dan edukasi, serta pelaporan dan monitoring evaluasi.

Dengan kondisi ini, diharapkan kasus stunting bisa menghasilkan intervensi yang lebih efektif, terutama untuk calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, serta anak baduta. Dalam pelaksanaannya Kota Sukabumi melaksanakan Program "Mentari Berdasi" dari Dinas Dalduk Kota Sukabumi juga disebutkan sebagai salah satu upaya signifikan dalam penurunan stunting. Program ini memaksimalkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam melakukan deteksi dini pada keluarga berisiko stunting. Ini adalah program prioritas yang harus kita wujudkan bersama, agar generasi mendatang bisa tumbuh dengan lebih sehat dan berkualitas. Program tersebut didukung oleh inovasi-inovasi sebagai berikut:

Pertama, inovasi Sistem Informasi Data Stunting Terintegrasi (siAupdate) sebuah aplikasi hasil integrasi e-ppgbm, pendataan keluarga, dan Sister. Merupakan aplikasi pencatatan bantuan bagi balita dan keluarga berisiko stunting;

Kedua, (Pangan lokal Sehat Bergizi Tinggi untuk Pencegahan New Stunting) Program berkelanjutan dari pelaksanaan pemberian PMT bagi 500 orang (baduta dan Ibu Hamil), dengan memanfaatkan bahan pangan lokal.

Ketiga, Inovasi Cegah Stunting Dari Hulu Dengan Sasaran Remaja Pelajar Sekolah SLTP & SLTA. Komitmen Bersama Mendukung Minum Ttd Rematri Antara Dinkes, DP2KBP3A, Disdik, dan Kemenag.

Keempat, Aplikasi bekerjasama dengan Indosat untuk memudahkan TPK dalam pencatatan dan pelaporan pendampingan.

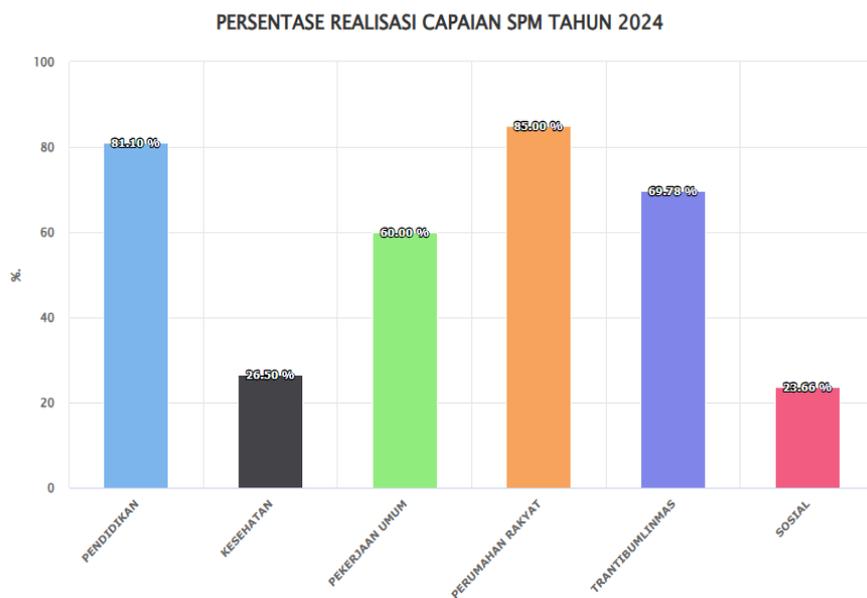
Sementara itu, Inovasi kewilayahan yang pertama Takan Canting (Taman Sayuran di Pekarangan untuk cegah anak stunting), Pasukan Bunda (PAUD Suka Ikan, sayuran dan buah-buahan), Kurikulum Posyandu Remaja Posyandu Remaja Sebagai Wadah Kegiatan Positif Bagi Remaja Termasuk

Pemberdayaan di Bidang Kesehatan. Posrem (Posyandu Remaja) Lemon Skul (Lurah Keliling Monitoring ke Sekolah Unggulan). Adapun Realisasi Anggaran dan Kinerja Program yang mendukung stunting Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut: (data terlampir pada buku II Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024)

3.3.3 Capaian SPM Kota Sukabumi Triwulan IV Tahun 2024

Gambar 3.11

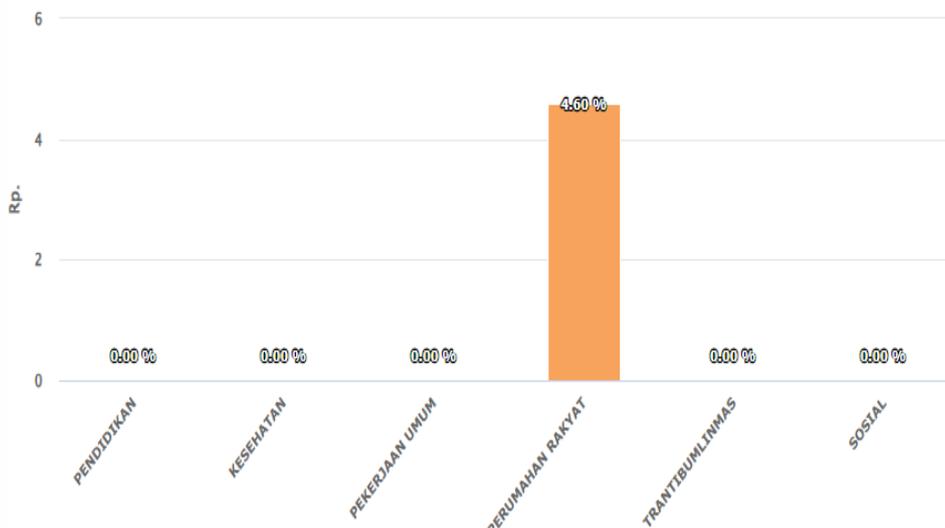
Persentase Realisasi Capaian SPM Tahun 2024



Gambar 3.12

Persentase Realisasi Anggaran Untuk Setiap Bidang

Persentase (%) Realisasi Anggaran Untuk Setiap Bidang Pada Kota Sukabumi Tahun 2024



Gambar 3.13

Permasalahan Penerapan SPM



Sumber data Aplikasi SPM.Bangda.Kemendagri Tahun 2024 TW.III

Dari data diatas dapat dilihat Persentase Realisasi Capaian SPM Kota Sukabumi pada tahun 2023 Triwulan III adalah sebagai berikut :

1. Capaian SPM Bidang Pendidikan 81,10%;
2. Capaian SPM Bidang Kesehatan 26,50%;
3. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum 60%;
4. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat 85%;
5. Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas 69,78%;
6. Capaian SPM Bidang Sosial 23,66%.

Persentase Realisasi Anggaran untuk setiap Bidang Pada Kota Sukabumi Tahun 2024

1. Capaian SPM Bidang Pendidikan 0%;
2. Capaian SPM Bidang Kesehatan 0%;
3. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum 100%;
4. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat 100%;
5. Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas 100%;
6. Capaian SPM Bidang Sosial 0%

3.4 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (dilengkapi dengan table Evaluasi RKPD)

3.4.1 Capaian Kinerja Per Urusan

Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan Pemerintah Kota Sukabumi menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Adapun capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Triwulan IV

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	URUSAN WAJIB	1.027.084.634.262	1.008.518.640.034	93,11	Sangat Tinggi	98,19	Sangat Tinggi
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	882.946.321.890	866.665.718.609	92,72	Sangat Tinggi	98,16	Sangat Tinggi
1.01	Pendidikan	261.713.466.548	258.860.539.729	92,83	Sangat Tinggi	98,91	Sangat Tinggi
1.02	Kesehatan	519.176.451.832	507.841.582.714	99,79	Sangat Tinggi	97,82	Sangat Tinggi
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69.255.136.267	67.952.491.842	98,77	Sangat Tinggi	98,12	Sangat Tinggi
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.525.796.000	6.171.396.393	94,57	Sangat Tinggi	94,57	Sangat Tinggi
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	18.670.222.517	18.361.823.268	80,02	Tinggi	98,35	Sangat Tinggi
1.06	Sosial	7.605.248.726	7.477.884.663	90,32	Tinggi	98,33	Sangat Tinggi
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	144.138.312.372	141.852.921.425	93,50	Sangat Tinggi	98,41	Sangat Tinggi
2.07	Tenaga Kerja	4.851.856.039	4.434.944.425	64,08	Rendah	91,41	Sangat Tinggi
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.941.679.285	8.776.103.942	96,02	Sangat Tinggi	98,15	Sangat Tinggi
2.09	Pangan	12.711.755.826	12.605.981.186	98,64	Sangat Tinggi	99,17	Sangat Tinggi
2.10	Pertanahan	180.000.000	119.825.460	67,00	Sedang	66,57	Sedang
2.11	Lingkungan Hidup	38.261.055.007	37.904.714.254	93,47	Sangat Tinggi	99,07	Sangat Tinggi

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	6.696.700.636	6.600.582.040	93,81	Sangat Tinggi	98,56	Sangat Tinggi
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-		Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.440.213.668	5.402.237.295	99,00	Sangat Tinggi	99,30	Sangat Tinggi
2.15	Perhubungan	20.609.912.280	20.296.286.565	97,80	Sangat Tinggi	98,48	Sangat Tinggi
2.16	Komunikasi dan Informatika	6.685.369.106	6.626.115.997	95,77	Sangat Tinggi	99,11	Sangat Tinggi
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.638.186.236	10.360.955.144	91,12	Sangat Tinggi	97,39	Sangat Tinggi
2.18	Penanaman Modal	7.032.039.693	6.929.696.543	95,13	Sangat Tinggi	98,54	Sangat Tinggi
2.19	Kepemudaan dan Olahraga	11.009.281.402	10.888.127.755	98,31	Sangat Tinggi	98,90	Sangat Tinggi
2.20	Statistik	79.658.000	79.508.000	100,00	Sangat Tinggi	99,81	Sangat Tinggi
2.21	Persandian	125.041.450	123.735.880	100,00	Sangat Tinggi	98,96	Sangat Tinggi
2.22	Kebudayaan	335.191.200	335.023.700	100,00	Sangat Tinggi	99,95	Sangat Tinggi
2.23	Perpustakaan	10.385.331.394	10.214.533.839	99,35	Sangat Tinggi	98,36	Sangat Tinggi
2.24	Kearsipan	155.041.150	154.549.400	100,00	Sangat Tinggi	99,68	Sangat Tinggi
3	URUSAN PILIHAN	9.855.634.380	7.358.856.036	100,00	Sangat Tinggi	74,67	Sedang
3.25	Kelautan dan Perikanan	948.218.550	944.644.650	100,00	Sangat Tinggi	99,62	Sangat Tinggi
3.26	Pariwisata	4.381.521.750	1.982.517.277	100,00	Sangat Tinggi	45,25	Sangat Rendah
3.27	Pertanian	2.833.000.430	2.781.950.040	100,00	Sangat Tinggi	98,20	Sangat Tinggi
3.28	Kehutanan						
3.29	Energi dan Sumberdaya Mineral						
3.30	Perdagangan	611.769.650	586.219.453	100,00	Sangat Tinggi	95,82	Sangat Tinggi
3.31	Perindustrian	994.124.000	978.109.816	100,00	Sangat Tinggi	98,39	Sangat Tinggi
3.32	Transmigrasi	87.000.000	85.414.800	100,00	Sangat Tinggi	98,18	Sangat Tinggi
4	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	117.760.013.867	115.501.989.459	94,84	Sangat Tinggi	98,08	Sangat Tinggi
4.01	Sekretariat Daerah	55.687.446.729	53.895.505.065	92,30	Sangat Tinggi	96,78	Sangat Tinggi
4.02	Sekretariat DPRD	62.072.567.138	61.606.484.394	97,38	Sangat Tinggi	99,25	Sangat Tinggi

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	79.083.260.448	76.957.228.555	97,65	Sangat Tinggi	97,31	Sangat Tinggi
5.01	Perencanaan	17.354.096.996	17.116.480.348	97,53	Sangat Tinggi	98,63	Sangat Tinggi
5.02	Keuangan	52.180.286.014	50.505.127.905	98,47	Sangat Tinggi	96,79	Sangat Tinggi
5.03	Kepegawaian	7.215.409.354	7.065.391.053	92,27	Sangat Tinggi	97,92	Sangat Tinggi
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	1.101.671.084	1.088.908.591	100,00	Sangat Tinggi	98,84	Sangat Tinggi
5.05	Penelitian dan Pengembangan	1.231.797.000	1.181.320.658	100,00	Sangat Tinggi	95,90	Sangat Tinggi
5.06	Penghubung						
5.07	Pengelolaan Perbatasan Daerah						
6	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10.868.481.541	10.702.771.949	94,81	Sangat Tinggi	98,48	Sangat Tinggi
6.01	Inspektorat	10.868.481.541	10.702.771.949	94,81	Sangat Tinggi	98,48	Sangat Tinggi
7	PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN	79.704.840.048	79.008.067.700	97,56	Sangat Tinggi	99,13	Sangat Tinggi
7.01	Kecamatan	79.704.840.048	79.008.067.700	97,56	Sangat Tinggi	99,13	Sangat Tinggi
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	33.491.831.864	33.184.679.240	98,28	Sangat Tinggi	99,08	Sangat Tinggi
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	33.491.831.864	33.184.679.240	98,28	Sangat Tinggi	99,08	Sangat Tinggi
	TOTAL	1.357.848.696.410	1.331.232.232.973	96,17	Sangat Tinggi	98,04	Sangat Tinggi

Dari data diatas dapat dilihat capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2024 ada beberapa urusan yang capaiannya sangat tinggi dan Tinggi, tetapi masih ada bebrapa urusan yang capaian masih sedang, hal tersebut disebabkan masih rendahnya pemahaman mengenai cara penghitungan realisasi kinerja sehingga Ketika input data pada system masih belum maksimal.

3.4.2 Capaian Kinerja Per Program

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Per Program

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	253.565.082.327,00	48.543.049.829,00	19,14	69,45	4,09	5,89
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	76.897.790.200,00	13.313.737.650,00	17,31	100	17	17,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	37.270.000,00		0,00	100	1	1,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	79.889.800,00	6.324.800,00	7,92	15	3	20,00
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	10.000.000,00	-	0,00	100	0	0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	35.000.000,00	-	0,00	90	0	0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	135.489.000,00	30.000.000,00	22,14	13	4	30,77
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	170.000.000,00	-	0,00	55	0	0,00
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	20.000.000,00	-	0,00	60	0	0,00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	50.000.000,00	-	0,00	76	0	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	65.625.000,00	-	0,00	55	0	0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	176.064.018.327,00	35.192.987.379,00	19,99	100	20	20,00
Dinas Kesehatan	505.371.959.394,00	118.275.733.823,00	23,40	99,70	8,00	8,02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	72.187.372.135,00	7.584.491.267,00	10,51	98,5	11	11,17

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.457.546.000,00	10.721.000,00	0,44	100	0	0,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	806.391.000,00	-	0,00	100	0	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.880.512.000,00	83.933.000,00	2,16	100	3	3,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	426.040.138.259,00	110.596.588.556,00	25,96	100	26	26,00
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	64.384.094.828,00	8.637.719.020,00	13,42	100	9,07	9,07
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.846.589.000,00	904.824.099,00	31,79	57,37	32	55,78
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.827.517.953,00	49.031.300,00	0,84	100	0	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.465.689.400,00	43.900.000,00	1,27	57,95	2	3,45
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	771.500.000,00	8.647.000,00	1,12	42,46	1	2,36
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	5.823.002.050,00	70.002.683,00	1,20	9,38	1	10,66
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.942.008.625,00	267.721.000,00	6,79	78,95	7	8,87
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	12.737.579.745,00	3.078.241.200,00	24,17	85,51	25	29,24
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	193.200.250,00	62.600.000,00	32,40	38,01	33	86,82
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	614.396.978,00	25.778.000,00	4,20	70	2	2,86
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	462.037.350,00	5.629.500,00	1,22	100	2	2,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	10.684.809.400,00	39.562.400,00	0,37	10	0	0,00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	861.930.800,00	6.965.000,00	0,81	1,36	0	0,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	316.523.850,00	46.615.000,00	14,73	11,38	2	17,57
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	20.750.000,00	3.355.000,00	16,17	70	3	4,29
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.816.559.427,00	4.024.846.838,00	25,45	100	26	26,00
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	13.236.221.593,00	3.851.572.520,00	29,10	100	38,33	38,33
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.630.136.850,00	470.649.500,00	28,87	100	29	29,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	280.999.000,00	167.420.000,00	59,58	100	57	57,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.325.085.743,00	3.213.503.020,00	28,38	100	29	29,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.178.796.764,00	1.405.156.463,00	33,63	100,00	27,00	27,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	363.335.000,00	107.333.100,00	29,54	100	29	29,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.815.461.764,00	1.297.823.363,00	34,01	100	25	25,00
Dinas Sosial	7.655.271.421,00	2.125.100.786,00	27,76	89,29	21,43	24,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.139.440.000,00	385.593.000,00	33,84	25,00	7	28,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	9.640.000,00	130.000,00	1,35	100	2	2,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	402.198.150,00	58.020.000,00	14,43	100	15	15,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	520.458.500,00	83.768.000,00	16,10	100	16	16,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	397.031.000,00	69.575.000,00	17,52	100	20	20,00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	31.915.000,00	19.775.000,00	61,96	100	60	60,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.154.588.771,00	1.508.239.786,00	29,26	100	30	30,00
Dinas Tenaga Kerja	4.656.862.620,00	1.027.551.248,00	22,07	100	14,67	14,67
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.945.646.820,00	977.695.348,00	24,78	100	25	25,00
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-	0,00	100	0	0,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	396.156.000,00	6.100.000,00	1,54	100	2	2,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	140.000.000,00	5.045.000,00	3,60	100	4	4,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	113.059.800,00	7.058.900,00	6,24	100	7	7,00
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	62.000.000,00	31.652.000,00	51,05	100	50	50,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	13.521.510.591,00	2.114.610.594,00	15,64	100	14,10	14,10

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	84.377.000,00	5.901.560,00	6,99	100	7	7,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	160.710.000,00	7.000.000,00	4,36	100	5	5,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	403.350.000,00	43.379.175,00	10,75	100	11	11,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	8.688.000,00	1.238.000,00	14,25	100	15	15,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	11.498.250,00	4.848.250,00	42,17	100	42	42,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	401.919.547,00	8.414.500,00	2,09	100	3	3,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	291.745.000,00	95.879.250,00	32,86	100	33	33,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.514.976.900,00	5.845.000,00	0,23	100	0	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.125.393.100,00	4.885.000,00	0,23	100	0	0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.518.852.794,00	1.937.219.859,00	25,76	100	25	25,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	13.103.891.981,00	2.989.704.065,00	22,815	87,45	23,82	27,23
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-	-	0,00	25	0	0,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN Masyarakat	544.768.250,00	67.454.000,00	12,38	22	13	59,09
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	113.650.000,00	-	0,00	90	0	0,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	6.749.400,00	2.477.300,00	36,70	89	38	42,70
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	405.932.700,00	54.381.250,00	13,40	26	14	53,85
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	93.952.000,00	3.925.000,00	4,18	110	5	4,55
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	341.783.500,00	40.357.250,00	11,81	100	12	12,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	793.956.000,00	65.974.114,00	8,31	100	100	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	177.248.336,00	3.055.000,00	1,72	100	3	3,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	320.450.050,00	4.667.500,00	1,46	100	2	2,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	10.000.000,00	4.850.000,00	48,50	100	48	48,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.295.401.745,00	2.742.562.651,00	26,64	100	27	27,00
Dinas Lingkungan Hidup	29.224.310.613,00	7.376.611.089,00	25,24	78,25	13,00	16,61
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	260.636.250,00	17.280.500,00	6,63	100	7	7,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	424.660.000,00	35.416.574,00	8,34	100	9	9,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	296.589.000,00	13.010.000,00	4,39	25,5	5	19,61

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	10.000.000,00	-	0,00	100	0	0,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	50.875.050,00	11.622.000,00	22,84	100	23	23,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100.000.000,00	-	0,00	33	0	0,00
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	30.018.500,00	763.000,00	2,54	25	3	12,00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	84.815.650,00	25.967.000,00	30,62	100	31	31,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.407.901.370,00	349.436.500,00	24,82	99	25	25,25
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.558.814.793,00	6.923.115.515,00	26,07	100	27	27,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.816.205.639,00	2.472.644.008,00	36,28	100	34,4	34,40
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	307.698.850,00	71.184.000,00	23,13	100	23,00	23,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	94.765.100,00	27.230.000,00	28,73	100	30,00	30,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	136.617.200,00	19.315.000,00	14,14	100	14,00	14,00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	19.983.000,00	13.245.000,00	66,28	100	67,00	67,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.257.141.489,00	2.341.670.008,00	37,42	100	38,00	38,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.861.069.043,00	1.796.771.220,00	26,19	84,60	17,20	20,33
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	496.747.000,00	168.158.000,00	33,85	90	34	37,78
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	330.562.000,00	31.294.000,00	9,47	93	10	10,75
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	51.123.000,00	5.350.000,00	10,46	60	11	18,33
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	125.041.450,00	3.280.000,00	2,62	100	3	3,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.857.595.593,00	1.588.689.220,00	27,12	80	28	35,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	11.519.128.574,00	2.461.344.095,00	21,37	100	8,35	8,35
PROGRAM PELAYANAN USAHA IZIN SIMPAN PINJAM	-	-	0,00	100	0	0,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	35.010.000,00	680.000,00	1,94	100	2	2,00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	25.000.000,00	-	0,00	100	0	0,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	44.200.000,00	-	0,00	100	0	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	81.400.000,00	-	0,00	100	0	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	785.948.950,00	58.042.000,00	7,38	100	8	8,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	350.000.000,00	-	0,00	100	0	0,00
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	45.066.300,00	1.995.000,00	4,43	100	5	5,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	339.320.450,00	68.847.000,00	20,29	100	21	21,00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	70.904.500,00	17.540.000,00	24,74	100	25	25,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	130.990.000,00	-	0,00	100	0	0,00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	130.980.000,00	33.074.000,00	25,25	100	27	27,00
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	74.000.000,00	-	0,00	100	0	0,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	174.571.000,00	20.201.000,00	11,57	100	12	12,00
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	60.550.000,00	2.865.000,00	4,73	100	7	7,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	144.150.000,00	14.305.000,00	9,92	100	10	10,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.027.037.374,00	2.243.795.095,00	24,86	100	25	25,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.867.989.145,00	1.500.099.149,00	25,56	100,00	21,50	21,50
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	64.999.500,00	17.577.500,00	27,04	100	27	27,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	427.473.500,00	68.348.000,00	15,99	100	16	16,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	130.606.800,00	12.983.000,00	9,94	100	10	10,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	109.688.500,00	38.616.000,00	35,21	100	35	35,00
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	75.000.000,00	10.640.500,00	14,19	100	15	15,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.060.220.845,00	1.351.934.149,00	26,72	100	26	26,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	11.458.392.361,00	3.008.966.217,00	26,26	55,43	16,14	29,11
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	957.759.950,00	410.562.950,00	42,87	80	43	53,75
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.540.273.350,00	339.031.850,00	13,35	18	14	77,78
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	325.320.000,00	186.991.186,00	57,48	20	10	50,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	231.835.500,00	20.975.500,00	9,05	4	0,36	9,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	96.900.000,00	3.150.000,00	3,25	16	3	18,75
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	768.212.500,00	59.745.000,00	7,78	150	11,6	7,73
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.538.091.061,00	1.988.509.731,00	30,41	100	31	31,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	7.086.254.094,00	1.520.899.866,00	21,46	67,1	15,2	22,65
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.473.510.520,00	116.794.700,00	7,93	72	8	11,11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	41.298.000,00	-	0,00	100	0	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	162.923.550,00	69.094.000,00	42,41	63,5	43	67,72
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	21.500.000,00	-	0,00	66,8	0	0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.387.022.024,00	1.335.011.166,00	24,78	100	25	25,00
Sekretariat Daerah	53.724.322.055,00	13.593.143.798,00	25,30	100	21,33	21,33
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.986.930.008,00	1.296.241.900,00	10,81	100	12	12,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	576.978.100,00	125.885.810,00	21,82	100	22	22,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.160.413.947,00	12.171.016.088,00	29,57	100	30	30,00
Sekretariat DPRD	57.360.514.735,00	15.749.786.747,00	27,46	100	28,50	28,50
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	20.474.902.550,00	5.205.755.853,00	25,43	100	27	27,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.885.612.185,00	10.544.030.894,00	28,59	100	30	30,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18.149.682.653,00	3.734.397.429,00	20,58	100	16,25	16,25
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.939.619.000,00	759.409.539,00	25,83	100	26	26,00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.054.013.500,00	255.571.328,00	6,30	100	7	7,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.462.292.000,00	51.069.200,00	3,49	100	4	4,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.693.758.153,00	2.668.347.362,00	27,53	100	28	28,00
Inspektorat Daerah	11.837.447.854,00	2.891.547.008,00	24,43	89,33	15,33	17,16
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.230.935.000,00	107.630.000,00	8,74	78	9	11,54
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	648.184.000,00	53.770.000,00	8,30	100	9	9,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.958.328.854,00	2.730.147.008,00	27,42	90	28	31,11
Dinas Perhubungan	18.358.329.505,00	4.134.857.886,00	22,52	100	18,50	18,50
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.376.803.150,00	268.688.357,00	11,30	100	12	12,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.981.526.355,00	3.866.169.529,00	24,19	100	25	25,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	67.370.770.898,00	15.004.581.682,00	22,27	100	17,00	17,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.640.911.230,00	13.076.605.837,00	28,65	100	29	29,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	14.636.028.068,00	704.918.426,00	4,82	100	5	5,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.440.257.350,00	190.277.150,00	13,21	100	14	14,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.653.574.250,00	1.032.780.269,00	18,27	100	20	20,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.448.172.972,00	1.764.536.268,00	20,89	100	11,33	11,33
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	687.021.800,00	50.423.526,00	7,34	100	8	8,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.071.321.186,00	4.913.200,00	0,46	100	0	0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.689.829.986,00	1.709.199.542,00	25,55	100	26	26,00
Kecamatan Cikole	15.846.261.351,00	819.822.660,00	5,17	100	11 2/5	11,40
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.848.921.926,00	25.004.600,00	1,35	100	1	1,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.403.240.150,00	79.077.800,00	1,80	100	2	2,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	68.199.950,00	13.489.600,00	19,78	100	20	20,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.357.500,00	2.880.000,00	18,75	100	19	19,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.510.541.825,00	699.370.660,00	7,35	100	15	15,00
Kecamatan Gunung Puyuh	12.106.702.085,00	2.008.453.879,00	16,59	100	9	9,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.411.998.708,00	8.704.800,00	0,62	100	0	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.919.040.900,00	56.494.500,00	1,94	100	2	2,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	52.698.000,00	8.586.000,00	16,29	100	17	17,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47.500.000,00	-	0,00	100	0	0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.675.464.477,00	1.934.668.579,00	25,21	100	26	26,00
Kecamatan Citamiang	12.984.122.323,00	2.460.596.726,00	18,95	99,4	11,6	11,67
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.235.396.222,00	84.761.500,00	6,86	97	7	7,22
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.148.094.000,00	24.362.900,00	0,77	100	0	0,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000,00	11.541.000,00	23,08	100	23	23,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.250.000,00	-	0,00	100	0	0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.520.382.101,00	2.339.931.326,00	27,46	100	28	28,00
Kecamatan Warudoyong	13.896.380.505,00	2.460.677.477,00	17,71	97,6	17	17,42
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.567.557.682,00	22.622.800,00	1,44	88	2	2,27
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.545.108.400,00	77.634.300,00	2,19	100	3	3,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	43.558.200,00	9.437.800,00	21,67	100	22	22,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.980.000,00	15.575.000,00	31,16	100	31	31,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8.690.176.223,00	2.335.407.577,00	26,87	100	27	27,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kecamatan Baros	10.363.706.723,00	1.802.997.991,00	17,40	100	12,2	12,2
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.144.236.860,00	58.269.900,00	5,09	100	6	6,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.423.652.700,00	12.422.000,00	0,51	100	0	0,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	36.768.200,00	6.465.000,00	17,58	100	18	18,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.854.000,00	2.590.000,00	10,86	100	11	11,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.735.194.963,00	1.723.251.091,00	25,59	100	26	26,00
Kecamatan Lembursitu	13.345.659.864,00	2.447.771.373,00	18,34	100	15,6	15,6
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.512.299.912,00	59.245.050,00	3,92	100	4	4,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.081.829.150,00	52.672.800,00	1,71	100	2	2,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	74.871.600,00	8.100.000,00	10,82	100	11	11,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	76.295.000,00	25.815.000,00	33,84	100	34	34,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.600.364.202,00	2.301.938.523,00	26,77	100	27	27,00
Kecamatan Cibeureum	11.190.040.790,00	2.101.906.642,00	18,78	77,2	10,4	13,47

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.177.917.668,00	58.374.800,00	4,96	80	5	6,25
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.526.604.750,00	22.118.600,00	0,88	31	0	0,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	52.648.000,00	5.864.400,00	11,14	75	11	14,67
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.227.000,00	2.470.000,00	8,17	100	8	8,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.402.643.372,00	2.013.078.842,00	27,19	100	28	28,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.044.866.306,00	971.637.400,00	16,07	100	12,6	12,6
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	913.532.900,00	162.817.900,00	17,82	100	18	18,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	909.688.506,00	6.097.500,00	0,67	100	0	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	747.281.500,00	32.312.000,00	4,32	100	5	5,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	420.381.000,00	63.425.000,00	15,09	100	16	16,00
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.053.982.400,00	706.985.000,00	23,15	100	24	24,00

3.4.3 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan

Pendekatan *Gap Analysis* (analisis kesenjangan) dan Analisis Deskriptif dapat digunakan sebagai metode evaluasi RKPD. *Gap Analysis* dipergunakan untuk membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Sementara Analisis Deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Dalam Analisis Deskriptif, data-data disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan lain-lain untuk mempermudah memahami data dan penyampaian informasi sehingga dapat diterima dan dipahami dengan baik.

Kedua metode diatas dipergunakan untuk menilai capaian anggaran dan kinerja perangkat daerah dan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan yang akan datang. Adapun hasil evaluasi capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Per Perangkat Daerah sebagai berikut: (data terlampir dalam buku II Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024)

3.5 Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Propinsi dan Nasional

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas yaitu daerah atau masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Perumusan isu strategis Kota Sukabumi Tahun 2024 dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah Tahun 2022;
2. Kondisi terkini Tahun 2023;
3. Arah kebijakan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026;
4. Arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat pusat;
5. Arah kebijakan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024; dan
6. Dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah disampaikan diatas, maka proses penyusunan isu strategis pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12

Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis Aktual
<ul style="list-style-type: none"> ❑ Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum dioptimalkan ❑ Ketersediaan pasar rakyat dan sarana distribusi belum optimal ❑ Belum berkembangnya sistem terpadu monitoring serta koordinasi ketersediaan dan harga bahan pokok ❑ Belum optimalnya pembinaan PKL ❑ Tingginya alih fungsi lahan termasuk LP2B ❑ Minat masyarakat untuk bertani makin berkurang ❑ Distribusi bibit tanaman hortikultura belum optimal ❑ <i>Urban farming</i> belum menjadi gerakan masif dalam 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Resesi ekonomi global ❑ Ketahanan pangan dan energi ❑ Transformasi digital 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Pemulihan ekonomi pasca Covid-19 ❑ Ketahanan pangan dan energi 	<p>Daya saing ekonomi</p>	<p>Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa</p>

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis Aktual
<p>mendukung ketahanan pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Belum optimalnya standarisasi budidaya perikanan <input type="checkbox"/> Fasilitasi pelaku olahan hasil perikanan belum optimal <input type="checkbox"/> Belum optimalnya manajemen koperasi <input type="checkbox"/> Belum optimalnya pola kemitraan antara koperasi dan UMK dengan pengusaha besar <input type="checkbox"/> Kurangnya promosi produk usaha mikro <input type="checkbox"/> Belum optimalnya fasilitasi perizinan bagi usaha mikro <input type="checkbox"/> Belum tersedianya database koperasi dan usaha mikro <input type="checkbox"/> Investasi sektor industri belum menarik minat investor <input type="checkbox"/> Potensi investasi belum digali secara optimal 				

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis Aktual
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rendahnya IKM produktif <input type="checkbox"/> Pemanfaatan teknologi bagi industri kecil masih rendah <input type="checkbox"/> Pemasaran produk IKM yang masih terbatas 				
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Luas wilayah relatif kecil <input type="checkbox"/> Belum optimalnya Kota Sukabumi sebagai PKW <input type="checkbox"/> Adanya disparitas pembangunan infrastruktur <input type="checkbox"/> Belum optimalnya pengelolaan air bersih <input type="checkbox"/> Belum optimalnya pengelolaan air limbah <input type="checkbox"/> Belum disusunnya RDTR <input type="checkbox"/> Fasilitas RTH publik yang belum optimal 		Percepatan pembangunan infrastruktur	Ketimpangan Jabar Selatan-Utara	Dampak PSN dan megaprojek lainnya

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis Aktual
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Masih adanya RTLH <input type="checkbox"/> Permukiman kumuh belum sepenuhnya tertangani <input type="checkbox"/> Degradasi lingkungan <input type="checkbox"/> Alih fungsi lahan yang terus berlangsung <input type="checkbox"/> Belum optimalnya pengelolaan persampahan <input type="checkbox"/> Kepedulian masyarakat akan lingkungan hidup masih kurang <input type="checkbox"/> Risiko bencana gempa bumi, tanah longsor, dan banjir cukup besar <input type="checkbox"/> Belum adanya peralatan untuk mendeteksi bencana 	Perubahan iklim	Pengurangan risiko bencana		Permukiman kumuh, lingkungan hidup dan kebencanaan
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Adanya kesenjangan terkait distribusi kekayaan, produktivitas tenaga kerja, akses ekonomi, dan ketahanan dalam menghadapi guncangan <input type="checkbox"/> Akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat miskin perlu ditingkatkan 	Arsitektur kesehatan global	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Peningkatan kualitas SDM <input type="checkbox"/> Kemiskinan ekstrem <input type="checkbox"/> Penanganan stunting 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Daya saing SDM <input type="checkbox"/> Kemiskinan ekstrem dan TPT 	Kualitas SDM

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis Aktual
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Komponen daya beli masyarakat sebagai pembentuk IPM perlu ditingkatkan <input type="checkbox"/> Lapangan kerja yang terbatas menyebabkan penyerapan tenaga kerja juga terbatas <input type="checkbox"/> Angka putus sekolah perlu ditekan <input type="checkbox"/> Angka melanjutkan sekolah antarjenjang pendidikan perlu ditingkatkan <input type="checkbox"/> Asupan gizi masyarakat perlu ditingkatkan <input type="checkbox"/> Angka kesakitan masyarakat perlu ditekan <input type="checkbox"/> Terdapat 4 kelurahan yang memiliki angka prevalensi <i>stunting</i> tinggi 				
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pelayanan umum di beberapa kecamatan masih belum optimal <input type="checkbox"/> Rekomendasi oleh APIP belum sepenuhnya ditindaklanjuti PD 		Reformasi Birokrasi	Reformasi birokrasi	Inovasi pemerintahan di

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis Aktual
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Evaluasi program oleh APIP belum sepenuhnya dilakukan <input type="checkbox"/> Belum idelanya jumlah ASN <input type="checkbox"/> Penghapusan tenaga honorer <input type="checkbox"/> Belum tersedianya data center <input type="checkbox"/> Terbatasnya pemahaman, pemanfaatan, dan penggunaan teknologi informasi <input type="checkbox"/> Belum optimalnya pengamanan informasi <input type="checkbox"/> Belum semua arsip didigitalisasi <input type="checkbox"/> Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan kebutuhan data statistik sektoral <input type="checkbox"/> Partisipasi dan distribusi data dari pengguna/PD terhadap kebutuhan pengguna data yang berkualitas sangat rendah 				

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis Aktual
<ul style="list-style-type: none"> □ Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan masih belum optimal □ Konflik sosial masih sering terjadi □ Ormas dan LSM masih banyak yang belum tertib administrasi □ Masih terdapat anak di bawah umur yang tergabung dalam Ormas dan LSM 		Pemilu dan pilkada serentak 2024		Pemilu dan pilkada serentak 2024

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023 (hasil analisis)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas, kemudian berbagai isu dalam pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka sesuai dokumen RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026, isu strategis pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut:

1. Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa;

Kontribusi per sektor lapangan usaha terhadap PDRB Kota Sukabumi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir didominasi oleh perdagangan, jasa keuangan, dan transportasi. Ketiganya berkontribusi masing-masing lebih dari 10 persen terhadap PDRB Kota Sukabumi. Bahkan untuk sektor perdagangan kontribusinya mencapai angka di atas 37 persen. Kontribusi ketiga sektor tersebut perlu ditingkatkan untuk menguatkan Kota Sukabumi sebagai pusat kegiatan wilayah.

Di Kota Sukabumi masih terdapat sektor potensial yang perlu dioptimalkan yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif serta pertanian perkotaan. Sebagai kota yang besar di masa kolonial, berbagai peninggalan yang ada di Kota Sukabumi perlu dilestarikan untuk menunjang atau sebagai destinasi obyek wisata. Demikian juga dengan ekonomi kreatif yang selama ini telah dikembangkan. Upaya untuk mengkapitalisasi kedua sektor tersebut perlu untuk lebih digencarkan.

Pertanian perkotaan merupakan sektor lain yang perlu dioptimalkan juga. Mengingat karekater Sukabumi yang sudah berupa kota namun luas lahan pertaniannya masih luas. Namun tekanan alih fungsi lahan tidak bisa dihindari. Karena itu, pertanian perkotaan merupakan alternatif pengembangan yang perlu dioptimalkan guna meningkatkan kontribusi bagi PDRB dan tentunya untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar.

2. Dampak proyek strategis nasional (PSN) dan mega proyek lainnya;

Pembangunan proyek strategis nasional yang berada di Kota Sukabumi dan sekitarnya terutama infrastruktur jalan tol dan kereta api akan meningkatkan aksesibilitas. Dengan demikian lalu lintas orang dan barang tentunya juga akan semakin meningkat. Peluang ini perlu dioptimalkan

mengingat Sukabumi dikenal juga sebagai kota transit sehingga daya tarik kota perlu dikembangkan dan direvitalisasi untuk semakin memanjakan pendatang yang transit ataupun melakukan aktivitas di Kota Sukabumi.

Mega proyek yang didanai baik dari Provinsi Jawa Barat maupun dari Kota Sukabumi sendiri juga menjadi pengungkit bagi perkembangan kota. Karena itu, perlu tetap dilakukan pembangunan mega proyek terutama yang dapat menjadi pengungkit perekonomian kota.

3. Permukiman kumuh, lingkungan hidup, dan kebencanaan;

Permasalahan perkotaan tidak akan pernah lepas dengan permukiman termasuk kawasan kumuh. Sehingga permukiman kumuh jika tidak diintervensi dengan cepat oleh semua pihak akan menyebabkan runtutan permasalahan lainnya. Walaupun penanganan permukiman kumuh di Kota Sukabumi cukup signifikan mengurangi luas permukiman kumuh dari sekitar 139 Ha hingga sekarang tinggal 5 Ha, namun upaya preventif harus tetap dilakukan.

Penanganan permukiman kumuh tentunya perlu dibarengi dengan penanganan lingkungan hidup secara keseluruhan. Hal ini mengingat degradasi lingkungan seperti penurunan kualitas air, udara, dan tutupan lahan cenderung terjadi tiap tahun. Jika hal ini tidak segera ditangani maka potensi kerusakan lingkungan yang semakin parah tidak dapat dihindarkan.

Kondisi lingkungan yang semakin menurun diperparah dengan risiko bencana yang mengancam Kota Sukabumi. Walaupun Indeks Risiko Bencana Kota Sukabumi masuk kategori menengah namun risiko bencana seperti gempa bumi, longsor, dan banjir cukup tinggi. Sehingga upaya untuk memitigasi bencana harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Sukabumi.

4. Kualitas sumber daya manusia (SDM);

SDM Kota Sukabumi jika dilihat dari indikator IPM sudah lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Namun demikian, tetap diperlukan upaya untuk meningkatkan IPM Kota Sukabumi

terutama dari komponen harapan lama sekolah. Mengingat komponen ini yang paling rendah kenaikannya.

Walaupun memiliki IPM yang lebih baik dari Provinsi Jawa Barat dan Nasional namun TPT dan Indeks Gini Kota Sukabumi masih lebih baik dari keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan seperti tingkat produktivitas tenaga kerja yang belum optimal dan merata, terbatasnya lapangan pekerjaan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang masih belum menjangkau semua kalangan, dan lainnya. Karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Kota Sukabumi akan terus dilakukan mengingat dinamika yang terjadi saat ini dan ke depannya akan diperlukan SDM yang tidak hanya cerdas dan terampil tetapi juga adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

5. Inovasi di pemerintahan; dan

Pemerintah Kota Sukabumi telah dianugerahi penghargaan Innovative Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu kota terinovatif. Untuk meraih itu, berbagai inovasi yang dihasilkan harus sesuai dengan standar IGA.

Terdapat sejumlah inovasi telah digulirkan Pemerintah Kota Sukabumi di berbagai bidang. Misalnya pada layanan kesehatan ada *homecare*, ambulans sigap, dan puskesmas klinik sore. Di bidang ekonomi, ada program Sukabumi Kelurahan Entrepreneurship Center (kece) untuk membentuk wirausaha baru di kelurahan dan Sukabumi Creative Hub (SCH). Program inovasi lainnya di bidang literasi, rumah singgah di Bandung, pembinaan keagamaan, dan lain sebagainya.

Inovasi di Kota Sukabumi harus terus dilahirkan untuk mengatasi berbagai keterbatasan dan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, Inovasi itu sendiri harus berkolaborasi bukan hanya dengan perangkat daerah tapi dengan pihak lainnya baik pihak swasta dan organisasi profesi. Sehingga pada akhirnya, inovasi diharapkan menjadi budaya dalam menjalankan roda pemerintahan.

6. Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

Tahun 2024 akan menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia, tak terkecuali di Kota Sukabumi. Pada tahun tersebut, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) bakal digelar serentak. Pemilu dan pilkada serentak 2024 akan menjadi kerja besar dan kerja keras semua pihak. Bagi penyelenggara mau tak mau harus menanggung beban kerja yang jauh lebih berat dibanding pemilu dan pilkada sebelumnya. Tak hanya bagi penyelenggara, pemilu dan pilkada serentak 2024 juga akan menjadi kerja berat bagi partai politik.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024, Pemerintah Kota Sukabumi melalui Badan Kesbangpol diharapkan selalu menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik agar dapat mengawal suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pilkada tersebut. Perkembangan situasi politik, dinamika sosial politik, kesiapan partai politik, pelaksanaan pendidikan politik perlu dipantau secara berkala. Tak lupa upaya deteksi dan pencegahan dini guna meminimalisir terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan jelang pemilu dan pilkada 2024 perlu dioptimalkan.

Berdasarkan rumusan 6 (enam) isu strategis di atas, serta tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan yang disusun mengacu pada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.13

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif</p>	<p>Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa</p>	<p>Meningkatkan iklim usaha yang kondusif</p>	<p>Meningkatkan pelayanan penanaman modal</p>
			<p>Meningkatkan kualitas sarana perdagangan</p>
			<p>Meningkatkan penggunaan dan promosi produk lokal</p>
			<p>Memberdayakan pelaku UMKM</p>
	<p>Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan</p>	<p>Menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok</p>	
	<p>Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat</p>		
<p>Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif</p>	<p>Mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai penopang perekonomian</p>	<p>Meningkatkan obyek daya tarik wisata</p>	
	<p>Meningkatkan pemasaram wisata</p>		
	<p>Mengkapitalisasi potensi ekonomi kreatif sebagai penopang perekonomian</p>	<p>Memanfaatkan dan melindungi HKI</p>	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan masyarakat	Meningkatkan pengelolaan pendidikan Meningkatkan literasi masyarakat
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu kesehatan masyarakat	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat Meningkatkan pembinaan keluarga berencana (KB)
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan pelatihan tenaga kerja Meningkatkan penempatan tenaga kerja
Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas jalan kota
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
			Meningkatkan pengelolaan persampahan
			Meningkatkan pengelolaan sistem air limbah
			Mengurangi RTLH

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman	Mengurangi luas kawasan kumuh
		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup
			Meningkatkan pengelolaan keragaman hayati
	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Meningkatkan situasi kota yang kondusif	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
			Meningkatkan kerukunan umat beragama
		Meningkatkan kapasitas penanggulangan dan penanganan bencana	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk meminimalkan risiko bencana
			Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana
	Meningkatkan kapasitas penanganan bencana		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penguatan 8 area perubahan	Meningkatkan manajemen kinerja pemerintahan
			Meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi
			Meningkatkan transparansi pemerintahan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing
	Meningkatnya inovasi daerah	Penguatan ekosistem inovasi	Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan litbang serta inovasi
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam inovasi
			Meningkatkan jejaring litbang dan inovasi
		Meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan IPTEK	Implementasi pemanfaatan inovasi

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023 (hasil analisis)

Dengan mempertimbangkan berbagai isu pembangunan maka dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Daerah. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan rencana pembangunan daerah karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama yang harus diselesaikan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai isu dalam pembangunan nasional dan provinsi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka diidentifikasi isu strategis daerah yang kemudian menjadi prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa
2. Peningkatan Kondusifitas Kota
3. Peningkatan Kondusifitas Kota Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif

Dalam melaksanakan prioritas pembangunan tersebut maka disusunlah arah kebijakan sebagai landasan dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan Kota Sukabumi, dari arah kebijakan dapat dilihat bahwa program kegiatan yang dilaksanakan Kota Sukabumi sangat mendukung dan mengacu kepada arah kebijakan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Program pembangunan Daerah merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan Daerah. Selain program pembangunan Daerah, terdapat beberapa proyek strategis yang akan dilaksanakan di Daerah yang dibiayai dari berbagai sumber anggaran. Hal ini merupakan cerminan dari aspek kolaborasi antara daerah, provinsi dan nasional dalam hal pendanaan dan menunjukkan adanya pertimbangan efisiensi penentuan program sesuai dengan prioritas pembangunan.

BAB IV

PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

4.1 Pendorong

Pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah pada Triwulan I Tahun 2025 dilaporkan dalam bentuk formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana telah diolah dan disajikan pada Bab III. Hasil evaluasi selain menyajikan informasi realisasi kegiatan pada Triwulan I, baik target maupun penyerapan anggaran, juga menyajikan tingkat pencapaian setiap sub kegiatan, kegiatan dan rata-ratanya per program dan per Perangkat Daerah. Capaian Indikator Makro, Capaian Sasaran (IKU), Capaian kinerja dan anggaran program setiap Perangkat Daerah berbeda-beda, namun secara umum dapat disimpulkan berada pada kategori yang **sangat rendah**.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025, Perangkat Daerah mengalami berbagai kendala baik eksternal, internal, maupun hal-hal yang mendorong dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga belum mencapai kinerja dengan baik dan sesuai target. Adapun Faktor Pendorong Dalam Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Dukungan Internal dari Pemerintah Daerah;

1. Kelancaran dan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan;
2. Waktu yang cukup untuk berjalannya kegiatan;
3. Keseimbangan antara waktu dengan jadwal yang sudah dirancang;
4. Proses administrasi secara tepat sasaran;
5. Struktur organisasi dan kelembagaan sudah kuat dan memiliki SOP serta pembagian tugas yang jelas.
6. Sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sudah tersedia di setiap Perangkat Daerah;

7. Peraturan terkait dengan pelaksanaan kegiatan/tugas;
8. Koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah;

4.2 Penghambatan

Adapun Faktor Penghambat Dalam Pendapaian Target Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya pagu pendapatan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat yang mengakibatkan *Refocussing* beberapa anggaran kegiatan mengakibatkan beberapa kegiatan harus berubah indikatornya dan tidak sesuai dengan target perencanaan jangka menengah yang telah ditetapkan;
2. Penetapan indikator kegiatan dan program yang tidak tepat mengakibatkan sulit tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan;
3. Faktor lingkungan yang tidak mendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;
4. Tidak sinkronnya antara rencana yang sudah dirancang dengan jumlah anggaran yang sudah tertera dalam DPA;
5. Faktor Sumber Daya Manusia yang tidak cakap atau belum mampu dalam melaksanakan kegiatan;
6. Pengadaan barang melalui e-catalog dan lelang masih dalam proses sehingga kegiatan tertunda;
7. Terlambatnya proses lelang karena kendala integrasi sistem SIPD dengan SIRUP;
8. Adanya kesalahan dalam mengevaluasi hasil kegiatan dan program sehingga tujuan utama pembangunan daerah tidak dapat tercapai. Dalam hal ini, secara umum proses evaluasi hanya dapat mendeteksi realisasi anggaran program dan kegiatan, dan belum mampu mengidentifikasi realisasi kinerja.

4.3 Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan RKPD Berikutnya

Untuk merespon faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja program yang dihadapi oleh Perangkat Daerah, Bappeda merumuskan dan memberikan usulan tindak lanjut yaitu berupa halhal yang

perlu dilakukan untuk membantu meningkatkan atau mencapai kinerja program pada tahun berikutnya. Saran tindak lanjut ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan bahan pertimbangan Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan. Adapun saran tindak lanjut tersebut disajikan per Perangkat Daerah sesuai dengan faktor pendorong dan faktor penghambat.

Tindak Lanjut yang dilaksanakan untuk pencapaian target kinerja sebagai berikut:

1. Tingkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi mengenai penambahan dana transfer/Dana Bantuan Keuangan;
2. Sosialisasi mengenai penetapan indikator kegiatan agar tidak ada kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari kegiatan;
3. Tingkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait/ stakeholders untuk ketepatan waktu dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan 2025;
4. Tingkatkan koordinasi dengan TAPD dalam penetapan besarnya pagu anggaran;
5. Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran;
6. Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan Pengadaan Barang dan Jasa;

Melakukan pengembangan Sistem SIPEKA (Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja) untuk kelancaran pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring yang dilakukan oleh Bappeda

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026. Program dan kegiatan prioritas pada RKPD tahun 2025 disusun mengikuti prinsip *money follow output priority programs* dengan orientasi pada pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Penyusunan RKPD tahun 2025 dilakukan dengan melihat keserasiannya dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017, dalam pelaksanaan RKPD perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi yang kemudian akan menjadi dasar bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya dan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Evaluasi ini dilakukan oleh Bappeda Kabupaten/Kota setiap triwulan dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah (Wali Kota) dan Bappeda Provinsi.

Secara umum capaian kinerja pemerintah Kota Sukabumi hasilnya dalam katagori sedang karena masih dalam proses pengerjaan, namun diharapkan di triwulan berikutnya semua program kegiatan bisa terselesaikan dengan baik sehingga capaian kinerja juga akan baik sebagai *triger* untuk mendapatkan prestasi daerah yang lebih baik. Sebagai contoh Kota Sukabumi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir selalu mendapatkan peringkat BB dalam penilaian Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) tingkat kabupaten/kota, diharapkan di tahun ini dan yang akan datang dapat lebih meningkat atau minimal mempertahankan nilainya sebagai bukti pencapaian kinerja pemerintah daerah yang baik. Salah satu indikator yang harus dicapai adalah realisasi anggaran dan kinerja di masing-masing perangkat daerah dapat kembali didominasi oleh kriteria sangat tinggi dan tidak ada satupun perangkat daerah yang termasuk dalam kriteria sedang atau dibawahnya.

Namun selain keberhasilan yang diperoleh secara umum juga ada beberapa permasalahan yang menghambat pencapaian realisasi sesuai dengan yang diharapkan. Tentu saja hal ini perlu menjadi perhatian, terutama bagi Bappeda sebagai induk perencana tingkat daerah. Perlu adanya pendampingan yang melekat melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatannya.

5.2 Rekomendasi

Langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan agar perencanaan pembangunan yang akan datang menjadi lebih baik, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam perspektif kedepan, perlu diperbaiki indikator kegiatan dan program agar sistem evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif, dan hasil evaluasi benar-benar dapat digunakan untuk menghasilkan kebijakan pengendalian yang sesuai dengan kondisi eksisting;
2. Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 idealnya Evaluasi triwulanan RKPD bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah, sehingga Bappeda hanya mengkompilasi evaluasi triwulanan Renja PD untuk menyusun evaluasi triwulanan RKPD. Dalam perspektif kedepan perangkat daerah perlu didorong untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Renjanya masing-masing dengan data yang akurat, tepat waktu dan berkualitas;
3. Perlu pendampingan dan pemahaman dalam menghitung capaian indikator kinerja dan input aplikasi/sistem Pelaporan dan Evaluasi Kinerja (SIPEKA) sehingga secara otomatis menghasilkan penilaian sesuai kriteria yang ditetapkan, dan output evaluasi dapat dengan cepat dihasilkan dan segera dapat ditindaklanjuti. Karena pada hakikatnya sistem Evaluasi dan Monitoring bukan sistem yang ditujukan untuk mengumpulkan angka dan data-data realisasi, melainkan sistem Evaluasi dan Monitoring harus mampu melakukan penilaian secara otomatis sehingga dapat memberikan informasi capaian kinerja yang

cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;